

**Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan
Permukiman di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**

**SKRIPSI
TUGAS AKHIR – 465 D5206
PERIODE II
TAHUN 2013/2014**

Sebagai Persyaratan untuk Ujian
Sarjana Arsitektur
Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota

**Oleh :
ANDI MUTMAINNAH T
D521 09 283**



PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA
JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

Changes in Agricultural Land Transfer function Become Land
Settlement in District Watang Sawitto Pinrang

AndiMutmainnah T¹, Yoenus Osman², Ihsan³

e-mail: mutmainnahandi38@gmail.com

ABSTRACT

Forms of land use of an area associated with population growth and activity . The increasing population and the more intense activity in the population of a place on the growing impact of land use change . On the other hand the land area in the region will never grow .SawittoWatang districts as capital Pinrang experienced fairly rapid growth , development centers at several points in the city to make changes Pinrang conversion of agricultural land into residential and commercial areas is so much going on . Where the analysis used by using a quantitative approach , spatial analysis , image analysis of digitized (GIS) to determine how much change in agricultural land into non-agricultural land in the period 2006-2012 by comparing maps of land use change in 2006 , 2009 and 2012 as well as the use of statistical analysis with Scatter graphs Exponential use to calculate population projections to determine how much demand for residential land in 10 years in the District WatangSawitto . The output of this research is the map of changes in land use in the District WatangSawitto in 2006 , 2009, and 2012 , and changes of land use in the District WatangSawitto in 2006 , 2009 and 2012, and the map changes direction over the land settlement in 2032.

Keywords: District WatangSawitto, farm/non-farm, PopulationProjections

¹)Students Programs and Regional Development Studies, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Hasanuddin.
^{2,3})Lecturer Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Hasanuddin.

Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

AndiMutmainnah T¹, Yoenus Osman², Ihsan³

e-mail: mutmainnahandi38@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Disisi lain luas lahan di suatu wilayah tidak akan pernah bertambah. Kecamatan Watang Sawitto selaku ibukota Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan yang cukup pesat, pembangunan pusat-pusat kegiatan di beberapa titik di kota Pinrang membuat perubahan alihfungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersil begitu banyak terjadi. Dimana analisis yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis spasial, analisis digitasi citra (GIS) untuk mengetahui seberapa besar perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan non pertanian pada periode 2006-2012 dengan membandingkan peta perubahan lahan tahun 2006, 2009 dan 2012 serta menggunakan analisis statistik dengan menggunakan grafik Scatter Exponential untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk untuk mengetahui seberapa besar permintaan lahan permukiman pada 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto. Keluaran dari hasil penelitian ini adalah peta perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Watang Sawitto pada tahun 2006, 2009, dan 2012, luas penggunaan lahan serta perubahannya di Kecamatan Watang Sawitto tahun 2006, 2009 dan 2012, dan peta arahan perubahan alih fungsi lahan permukiman tahun 2032.

Kata Kunci : Kecamatan Watang Sawitto, lahan pertanian/non pertanian, Proyeksi Penduduk

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

^{2,3)} Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

PENGESAHAN

SKRIPSI

PROYEK : TUGAS SARJANA PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN KOTA

JUDUL : PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI
LAHAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN WATANG
SAWITTO KABUPATEN PINRANG

PENYUSUN : **ANDI MUTMAINNAH TIRTASARI**

NO. STB : **D521 09 283**

PERIODE : II – Tahun 2013/2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. H. Moh. Yoenus Osman, MSP

Dr. Eng. IhsanLatief, ST.,MT

NIP. 19510307197903 1 003

NIP. 19710219 199903 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Arsitektur

Ketua Program Studi PWK

Fakultas Teknik

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik

Universitas Hasanuddin

Universitas Hasanuddin

Baharuddin Hamzah, ST.,M.Arch.,Ph.D

Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT

DAFTAR ISI**Halaman**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR	
TABEL.....	iv
DAFTAR	
GAMBAR.....	v
BABI PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	4
C. TujuanPenelitian	4
D. ManfaatPenelitian	5
BABII TINJAUAN PUSTAKA	
A. TinjauanTentangLahan.....	6
1. LahandanPenggunaanLahan.....	6
2.TeoriLokasi.....	7
3.PolaPenguasaanLahandanStrukturAgraria.....	8
4. Tata GunaLahandalamPerkotaandanPedesaan.....	11
5. KonversiLahandan factor Penyebab.....	14
6. FaktorPenyebabKonversiLahan.....	17
7. DampakKonversi(TataGunaLahandanRTRW.....	17
B.PengertianAlihFungsiLahan	17
C. Rencana Tata Ruang Wilayah danImplementasinya	20
D. TeoriAkses.....	24

E. Tentang Kebijakan Publik.....	27
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	31
2. Aspek Kebijakan Dalam Alih Fungsi Lahan.....	34
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	36
4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	36
F. Kerangka Pemikiran	40
G. Bagankerangka penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	43
B. Tipedan Dasar Penelitian	44
C. Jenis Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang.....	54
1. Keadaan Geografis.....	54
2. Admintrasi Kabupaten Pinrang.....	55
3. Luas Wilayah Kabupaten Pinrang.....	56
4. Ketinggian Kabupaten Pinrang.....	56
5. Kependudukan Kabupaten Pinrang.....	56
B. Gambaran Umum Kecamatan Watang Sawitto.....	57
1. Keadaan Wilayah	57
2 Topografi Kecamatan Watang Sawitto.....	59
3. Keadaan Penduduk Keamatan Watang Sawitto.....	60
4. Sarana Kecamatan Watang Sawitto.....	63
C. Peta Lokasi Penelitian.....	67
D. Proyeksi Jumlah Penduduk.....	71
E. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto.....	76

F. Hasil	
Survey.....	92
G. Perubahan Penggunaan Lahan.....	96
H. Perubahan Pola Penguasaan Lahan.....	98
I. Perubahan Orientasi Nilai Atas Lahan.....	99
J. Proses Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkotaan di Kecamatan Watang Sawitto (Awal Konversi Lahan)	100
K. Dampak Ekologi.....	104
L. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap RTRW di Kecamatan Watang Sawitto.....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Penduduk Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2011 adalah 237.641.326 jiwa. Jumlah ini bertambah terus setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5 persen (Data BPS, 2011). Pertambahan penduduk ini secara otomatis mengakibatkan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Sebagai gambaran, tingkat kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2011 adalah 123,23 jiwa per kilometer persegi (Data BPS, 2011). Peningkatan kepadatan penduduk Indonesia yang sedemikian cepat mengakibatkan kebutuhan akan lahan sebagai tempat beraktivitas juga meningkat.

Aktivitas pembangunan berlangsung di berbagai bidang, terutama di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan kepadatan penduduk 892 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2011 (Data BPS 2011), termasuk Jumlah Penduduknya sebanyak 52.638 jiwa dan kepadatan penduduk 864 Jiwa/Km² tahun 2010 (Registrasi Penduduk 2010) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas dan Kepadatan Penduduk 2011

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Luas (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
Siparappe	1.402	1.423	2.825	24.21	117
Salo	2.062	2.120	4.182	9.17	466
Sipatokkong	1.324	1.474	2.798	7.46	375
Penrang	6.098	6.319	12.417	2.37	5.239
Jaya	4.151	4.136	8.287	1.22	6.792
Sawitto	2.122	2.345	4.467	0.90	4.963
Maccorawalie	5.619	6.010	11.629	4.35	2.673
Bentenge	2.979	3.054	6.033	9.29	649
JUMLAH	2011	25.757	26.881	52.638	58.97

Sumber : Data BPS Tahun 2011

Fungsi Kecamatan Watang Sawitto selaku ibukota Kabupaten Pinrang sangat berpengaruh terhadap RTRW Pinrang, karena menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan Perkotaan Pinrang merupakan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029.

Kecamatan Watang Sawitto sebagai Kawasan Perkotaan Kabupaten Pinrang ditetapkan menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pinrang secara administratif. Sekaligus Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki

cakupan pelayanan wilayah Kabupaten Pinrang terakses oleh sistem jaringan arteri primer sebagai jalan Lintas Barat Sulawesi mulai dari Kawasan Perkotaan Mamminasata (PKN) sampai perbatasan Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Watang Sawitto sebagai PKL Pinrang juga direncanakan memiliki interkoneksi dengan beberapa simpul transportasi yang berskala pelayanan internasional dan nasional yang berada di sekitar Kabupaten Pinrang melalui jaringan prasarana transportasi laut dan darat. Simpul transportasi tersebut yakni Pelabuhan Laut Nasional Pare-Pare (RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032).

Luas daerah Kabupaten Pinrang 1961,77 Km² dan Kecamatan Watang Sawitto 58,97 Km² (BPS Kabupaten Pinrang tahun 2011). Menurut data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang tahun 2011, luas areal persawahan Kabupaten Pinrang 38.497 Ha sedangkan Kecamatan Watang Sawitto adalah 4.289 Ha. Menurut data Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang tahun 2011, luas lahan yang ditempati bangunan Kabupaten Pinrang 5.186 Ha sedangkan Kecamatan Watang Sawitto 371 Ha (Dinas Pertanahan Kabupaten Pinrang). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas keseluruhan kawasan perkotaan. Perubahan fungsi sawah hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50%.

Penjelasan yang terurai di atas dapat mengaris bawahi hal-hal yang penting diantaranya, dengan adanya penambahan penduduk dan pembangunan menyebabkan jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan semakin terbatas, sehingga penggunaan lahan akan mengarah kepada penggunaan yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Tingginya nilai ekonomis mengakibatkan terjadinya konversi lahan. Konversi lahan yang terjadi pun terkadang tidak sesuai dengan tata guna lahan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan alasan-alasan ini perlu dilakukan sebuah penelitian yang menganalisis perubahan alih fungsi lahan pertanian.

Dari pemaparan diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian pada priode 2006-2012?
2. Seberapa besar permintaan lahan permukiman pada 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian pada priode 2006-2012.
2. Untuk mengetahui seberapa besar permintaan lahan permukiman pada 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu Arsitektur dan Pembangunan.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman di Kecamatan Watang Sawitto.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- b. Input bagi para pengambil kebijakan di Sulawesi Selatan pada periode berikutnya agar menjalankan amanah konstitusi dalam menangani masalah alih fungsi lahan dan RTRW.

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
- b. Ruang Lingkup Materi: Jumlah penduduk, peta penggunaan lahan tahun 2006, 2009 dan 2012 di Kecamatan Watang Sawitto, jumlah penduduk eksisting tahun 2006, 2009, 2012, proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, 2018, 2021, Kepmen Perumahan dan Prasarana wilayah No.403/KPTS/M/2002

2. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini membahas kajian teori yang menjadi landasan penelitian dan acuan analisis.

Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini membahas metode penelitian yang digunakan

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas hasil hasil dan pembahasan dalam penelitian yang digunakan.

Bab V Penutup

Pada bagian ini berisi penutup yang merupakan ringksasan penelitian dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Lahan

1. Lahan dan Penggunaan Lahan (*Land Use*)

Lahan mengandung makna lingkungan fisik yang mencakup relief, iklim, tanah, air, udara, dan juga vegetasi. Sehingga lahan dapat disimpulkan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi dan mencakup semua komponen yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut. Lahan sesuai dengan UUPA 1960 (pasal 1 ayat 2,4,5,6) merupakan bagian dari tanah yang merupakan objek agraria, sehingga lahan memiliki keterkaitan dengan tanah sebagaimana dengan definisinya bahwa lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya sudah ada pemilikinya, baik perorangan atau lembaga, juga merupakan modal utama dalam kegiatan pertanian. (Menurut Soewarno 2007), lahan memiliki komponen yang dipandang sebagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga sebagai suatu modal utama, lahan memiliki dua fungsi dasar yaitu: (1) fungsi kegiatan sosial, dimana sebuah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial seperti pemukiman, baik perkotaan dan pedesaan, dan (2) fungsi lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan untuk menjadi kawasan lindung dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada, mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, juga segala nilai sejarah negara yang bermanfaat dalam pelestarian budaya.

Kemudian (Jayadinata 1999) menggolongkan lahan ke dalam tiga kelompok yaitu: Nilai keuntungan, yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang dapat dicapai dengan jual-beli tanah di pasaran bebas.

- a. Nilai keuntungan umum, yang dihubungkan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat.
- b. Nilai sosial, yang merupakan hal dasar bagi kehidupan dan dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya.

Karakteristik lahan sebagai sumber daya yang jumlahnya tetap dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan, membutuhkan suatu perencanaan yang berkaitan dengan pola pemanfaatan lahan guna memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Segala bentuk intervensi manusia terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat di katakan *land use* atau penggunaan lahan/tata guna lahan. Tata guna lahan meliputi dua unsur, yaitu : tanah, sebagai sumber daya alam, dan tata guna, yang berarti penataan/pengaturan penggunaan. Kemudian dalam hubungannya dengan tata guna lahan, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai lahan, yaitu (1) kualitas fisik lahan, (2) lokasi lahan terhadap pasar hasil-hasil produksi dan pasar sarana produksinya, (3) interaksi diantara keduanya. Menurut Norton (1984), nilai lahan akan semakin besar apabila kualitas biofisiknya semakin baik dan lokasinya semakin dekat dengan pasar. Salah satu tipe penggunaan lahan yang penting ialah tipe pemanfaatan lahan (*utilization type*).Tipe ini merupakan upaya penyesuaian antara kondisi lahan yang ada dengan rencana pemanfaatan lahan.

2. Teori Lokasi

Mekanisme perubahan penggunaan lahan melibatkan kekuatan-kekuatan pasar, sistem administratif yang dikembangkan pemerintah, dan kepentingan politik.Pemerintah di sebagian besar negara di dunia pada kenyataannya memegang peran kunci dalam alokasi lahan seperti pajak,

zonasi (zoning), maupun kebijakan langsung seperti kepemilikan lahan misalnya hutan, daerah lahan tambang, dan sebagainya (Prayudho, 2009).

Model klasik dari alokasi lahan adalah model Ricardo (*Ricardian Rent*). Menurut model ini, alokasi lahan akan mengarah pada penggunaan yang menghasilkan surplus ekonomi (*land rent*) yang lebih tinggi, yang tergantung pada derajat kualitas lahan yang ditentukan oleh kesuburannya serta kelangkaan lahan. Menurut pendekatan von Thunen nilai *land rent* bukan hanya ditentukan oleh kesuburannya tetapi merupakan fungsi dari lokasinya. Pendekatan ini mengibaratkan pusat perekonomian adalah suatu kota yang dikelilingi oleh lahan yang kualitasnya homogen. Tata guna lahan yang dihasilkan dapat dipresentasikan sebagai cincin-cincin lingkaran yang bentuknya konsentris yang mengelilingi kota tersebut. Pendekatan von Thunen mencoba untuk menerangkan berbagai jenis pertanian dalam arti luas yang berkembang disekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian tersebut (Prayudho, 2009).

Alih fungsi lahan sawah tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa sektor ekonomi tumbuh dengan cepat sehingga sektor tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas. Lahan sawah yang terletak dekat dengan sumber ekonomi akan mengalami pergeseran penggunaan ke bentuk lain seperti pemukiman, industri manufaktur dan fasilitas infrastruktur. Hal ini terjadi karena *land rent* persatuan luas yang diperoleh dari aktivitas baru lebih tinggi daripada yang dihasilkan sawah (Prayudho 2009).

3. Pola Penguasaan Lahan

Tata guna lahan merupakan suatu bentuk kesatuan dari penataan, pengaturan lahan oleh pemilik, penguasaan dan pengusaha atas

lahan. Kata pemilikan menunjuk kepada penguasaan secara formal, sedangkan penguasaan menunjuk kepada penguasaan efektif dengan tujuan mengusahakan lahan secara efektif. Hubungan antara pemilikan dan penguasaan atas lahan dapat dikatakan sebagai suatu konsep agraria, dimana lahan seperti telah diterangkan sebelumnya merupakan bagian dari objek agraria, sedangkan subjek agraria merupakan pihak yang memiliki dan menguasai objek agraria. Menurut Sitorus (2004) subjek agraria dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Komunitas, sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga yang mencakup unsur-unsur individu, keluarga dan kelompok, Pemerintah, sebagai representatif negara yang mencakup pemerintahan daerah, pemerintah desa, dan juga Badan Usaha Milik Negara serta Swasta (*private sector*) mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar.

(Sitorus 2004) menjelaskan bahwa hubungan antara subjek agraria dengan objek agraria dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Hubungan Teknis Agraris, yang menunjukkan cara kerja subjek agraria dalam pengolahan dan pemanfaatan objek agraria untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Hubungan Sosial Agraris, menunjukkan hubungan antara ketiga subjek agrarian yang saling berinteraksi dalam rangka pemanfaatan objek agraria. Dengan kata lain hubungan ini berpangkal kepada pada perbedaan-perbedaan akses (penguasaan/pemilikan/dan pemanfaatan) terhadap objek agraria.

Hubungan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tersebut akhirnya disebut dengan istilah struktur agraria.

Struktur agraria digambarkan dalam bentuk segitiga yang saling berhubungan antara subjek agraria dan objek agraria. Hubungan ini dapat menimbulkan suatu interaksi sosial, baik itu kerjasama ataupun konflik. Hubungan kerjasama dapat timbul apabila antara subjek agraria mempunyai kesepakatan dan kepentingan yang sama dalam hal

pemanfaatan objek agraria. Konflik dapat timbul apabila ada perbedaan artikulasi diantara subjek agraria dalam pemanfaatan objek agraria. Konflik inilah yang akhirnya menimbulkan masalah agraria. Masalah agraria dan penguasaannya merupakan masalah yang kompleks dan tidak sederhana karena ia menyangkut konstelasi hubungan-hubungan agraria.

(Menurut Dietz 1998) gejala konflik dalam hubungan-hubungan agraria berasal dari pertentangan pengakuan menyangkut tiga hal berikut :

- a. Siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang menyertainya.
- b. Siapa yang berhak memanfaatkan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam.
- c. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Konflik agraria juga bersumber dari kenyataan ketimpangan atau *incompabilities*.

(Menurut Wiradi 2002) terdapat tiga macam ketimpangan menyangkut sumber-sumber agraria, yaitu :

- a. Ketimpangan dalam hal struktur, kepemilikan, dan penguasaan tanah.
- b. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah.
- c. Ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agrarian.

Pola-pola hubungan atau interaksi sosial agraria yang terdapat dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh formasi sosial yang ada. Perbedaan pola hubungan agraria yang berlaku dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perbedaan cara produksi yang eksis dan tipe cara produksi yang dominan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan tipe-tipe struktur agraria, sebagai berikut :

- a. Tipe Kapitalisme :sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan).

- b. Tipe Sosialisme : sumber agraria dikuasai oleh negara atau nama kelompok atau keluarga pekerja.
- c. Tipe Populisme/Neo-Populisme : sumber agraria dikuasai oleh keluarga/ rumah tangga pengguna.
- d. Tipe Naturalisme : sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat secara kolektif
- e. Tipe Feodalisme : sumber agraria dikuasai oleh minoritas “tuan tanah” yang biasanya juga merupakan “patron politik”.

Perlu ditekankan bahwa kelima tipe struktur agraria ini tidak mungkin ditemukan secara mutual eksklusif dalam suatu masyarakat. Hal yang memungkinkan adalah dua atau lebih tipe struktur agraria sama-sama berada dalam suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe lainnya.

4. Tata Guna Lahan Dalam Perkotaan dan Pedesaan

Kota menurut pengertian geografis merupakan suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok, dan mata pencaharian penduduknya beragam tidak hanya di bidang pertanian. Pedesaan adalah kesatuan pemerintahan, dan terdiri atas sejumlah kampung dan kawasan pertanian yang luas yang berfungsi untuk memproduksi bahan makanan dan bahan mentah bagi industri. Perbedaan paling mendasar antara kota dengan desa adalah kota lebih bersifat *self contained* atau serba lengkap. Penduduk kota tidak hanya bertempat tinggal di kota, tetapi juga melakukan kegiatan ekonomi, seperti bekerja di dalam kota, bahkan melakukan rekreasi di dalam kota, sedangkan penduduk desa cenderung hanya bertempat tinggal di desa, tetapi mencari pekerjaan di luar desa, dan berekreasi ke luar desa.

Tata guna lahan dirumuskan dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu wilayah, baik perkotaan ataupun pedesaan. Hal ini disebabkan susunan struktur dan pemanfaatan tanah yang berbeda antara pedesaan dan

perkotaan. Perkotaan dalam pemanfaatan tanah lebih banyak ditekankan dalam pemanfaatan untuk kawasan pemukiman, kawasan lapangan pekerjaan, dan kawasan rekreasi (Jayadinata 1999). Peraturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan tanah dirumuskan dengan tujuan agar tanah yang jumlahnya semakin terbatas dapat digunakan sebaik-baiknya, dan memenuhi semua kepentingan dari berbagai sektor.

Pemanfaatan dan penggunaan lahan dapat juga diartikan sebagai suatu tata ruang. Ruang dan wilayah disini juga termasuk ke dalam sumberdaya agraria, dengan pengertian ruang menurut Jayadinata (1999), merupakan suatu wilayah dengan batas geografi tertentu yang terdiri dari lapisan tanah di bawahnya juga lapisan udara di atasnya dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, sedangkan wilayah merupakan suatu kesatuan antara tanah dengan manusia, dimana adanya hubungan diantara keduanya. Rencana tata ruang berguna untuk membagi ruang yang ada didalam suatu bagian secara lebih spesifik seperti pemukiman, tempat perdagangan (pasar), industri, dan juga ruang terbuka hijau (Jayadinata 1999). Alokasi ruang terbesar dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman, sesuai dengan Keputusan Menteri No.214/2002 mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman (KSNPP). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perumahan dan pemukiman tidak dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkan, terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana (utilitas umum). Dirumuskannya suatu Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan secara spesifik sesuai dengan perencanaan tata pengembangan kota.

Tata guna tanah dalam perkotaan dan pedesaan berbeda. Tata guna tanah perkotaan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian dalam ruang dari peran kota: kawasan tempat tinggal, kawasan tempat bekerja, dan kawasan rekreasi. Menurut Jayadinata (1999) dalam tata guna tanah perkotaan terdapat beberapa teori, yaitu:

- a . Teori Jalur Sepusat (Jalur Konsentrik), yang membagi kota ke dalam beberapa bagian seperti pusat kota, kawasan pemukiman, dan kawasan industri,
- b. Teori Sektor (*Sector theory*), dan
- c. Teori Pusat Lipatganda, dimana teori ini berlaku bagi kota besar. Tata guna tanah dalam perkotaan lebih menyorotkan pembagian antara kawasan pemukiman, kawasan pusat kota, kawasan rekreasi, dan kawasan industri.

Tabel 2.Tata Guna Tanah

	Tanah Perkotaan	Tanah Pedesaan
Jalur Transportasi	+	-
Fasilitas Umum	+	-
Kegiatan Pertanian	-	+
Jaringan Infrastruktur	+	-
Nilai Ekonomi Lahan	+	-
Sasaran Spekulasi	+	-

Sumber: Buku tata guna lahan

Tata guna tanah dalam pedesaan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Kepentingan ekonomi, seperti kegiatan ekonomi pertanian ataupun non pertanian. Kepentingan sosial mencakup kehidupan sosial, seperti berkeluarga, sekolah, beribadah atau dapat dikatakan kampung di pedesaan merupakan tempat kediaman (*dormitory settlement*). Kediaman atau pemukiman di dalam pedesaan.

Menurut Jayadinata (1999) terbagi kedalam dua tipe yaitu:

- a. Pemukiman Memusat, pemukiman ini biasa disebut pemukiman tradisional, dimana masyarakat yang tinggal di sekitarnya kental dengan nilai modal sosial yang tinggi, selain itu tipe pemukiman ini dianut karena kepemilikan tanah yang sempit.
- b. Pemukiman Terpencar, merupakan pemukiman yang letak antar rumah di desa terpencar menyendiri (*disseminated rural settlement*).

Perkotaan sebagai pusat dari perkembangan dan pertumbuhan perekonomian, membuat tanah di perkotaan dalam pemafaatannya lebih ditekankan ke dalam sektor industri dan rekreasi atau non pertanian, kebalikan dari tanah di pedesaan dimana tanah yang ada lebih banyak dimanfaatkan pada kegiatan pertanian, walaupun lahan juga dimanfaatkan untuk kegiatan *off-farm*. Tanah di pedesaan lebih difokuskan sebagai tempat penghasil bahan baku yang diperlukan untuk perindustrian di perkotaan.

5. Konversi Lahan dan Faktor Penyebab

Konversi Lahan menurut Sihaloho (2004) adalah proses alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non-pertanian atau dari lahan non-pertanian ke lahan pertanian. Konversi lahan dari non-pertanian ke lahan pertanian merupakan proses konversi dalam rangka program eksetensifikasi pertanian. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian mengalami laju yang tinggi untuk keperluan pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk yang masih relatif tinggi. Faktor perkembangan industri dan pemukiman merupakan faktor penting yang mempengaruhi konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, yang kemudian diikuti dengan keberpihakan pemerintah terhadap sektor swasta.

(Menurut Sihaloho 2004), faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Faktor pada aras makro: meliputi pertumbuhan industri, pertumbuhan pemukiman, pertumbuhan penduduk, intervensi pemerintah dan marginalisasi ekonomi.
- b. Faktor pada aras mikro: meliputi pola nafkah rumah tangga (struktur ekonomi rumah tangga), kesejahteraan rumah tangga (orientasi nilai ekonomi rumah tangga), strategi bertahan hidup rumah tangga (tindakan ekonomi rumah tangga).

Dengan demikian konversi lahan telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini berhubungan dengan perubahan struktur agraria, proses marginalisasi/kemiskinan dan pelaku konversi (warga masyarakat) tersubordinasi oleh pihak pemanfaat konversi. Implikasi dari perubahan struktur agraria adalah perubahan pola penguasaan agraria, pola nafkah, pola hubungan produksi, dan perubahan orientasi nilai terhadap sumberdaya agraria. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa konversi lahan telah meningkatkan ketidakadilan agraria.

Berdasarkan hal-hal tersebut Sihaloho (2004) membagi konversi lahan menjadi tujuh tipologi, yaitu :

a. Konversi Gradual Berpola Sporadis

Diakibatkan oleh dua faktor utama, yakni lahan yang kurang/tidak produktif (tidak bermanfaat secara ekonomi) dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi.

b. Konversi Sistematis Berpola 'enclave'

Diakibatkan oleh lahan yang kurang produktif sehingga dialihfungsikan menjadi lebih baik untuk meningkatkan nilai manfaatnya.

c. Konversi Lahan Sebagai Respon Atas Pertumbuhan Penduduk (*population growth driven land conversion*) diakibatkan oleh faktor penggerak utama pertumbuhan penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakat, atau disebut juga konversi adaptasi demografi.

d. Konversi Yang Disebabkan Oleh Masalah Sosial (*social problem driven land conversion*)

Diakibatkan dari adanya keinginan (motivasi) masyarakat untuk berubah haluan dan keluar dari sektor pertanian. Hal ini dapat didasari oleh keterdesakan ekonomi ataupun keinginan perubahan kesejahteraan.

e. Konversi Tanpa Beban

Pola konversi tanpa beban ini terkait dengan pola konversi masalah sosial yang hal diakibatkan keinginan untuk berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang lebih baik.

f. Konversi Adaptasi Agraris

Terjadi karena keterdesakkan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat demi meningkatkan hasil pertanian.

g. Konversi Multi Bentuk atau Tanpa Bentuk

Diakibatkan berbagai faktor secara khusus faktor yang dimaksud yaitu faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak spesifik dijelaskan dalam konversi demografi.

Keberpihakan pemerintah terhadap sektor swasta dapat mengakibatkan konversi lahan, sehingga berlangsung paradigma yang meniru pola kolonial, yaitu tanah untuk negara dan swasta (kapitalisme). Hal ini akhirnya akan menimbulkan pemusatan kekuasaan di satu pihak, dan terjadi fragmentasi lahan di pihak lain. Fragmentasi lahan yang dicapai menunjuk nilai keuntungan, dimana tanah terjadi jual-beli tanah dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini seakan menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dibuat dan dilanggar oleh pemerintah sendiri, yang akhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

(Sihaloho 2004) menegaskan bahwa konversi lahan telah meningkatkan ketidakadilan agraria, atau dapat dikatakan bahwa konversi lahan mempengaruhi atau memicu terjadinya perubahan struktur agraria. Hal ini ditunjukkan melalui perubahan pola penguasaan lahan dengan adanya pemusatan kekuasaan dan fragmentasi lahan, penurunan pola produksi yang ditandai dengan penurunan produktivitas lahan, penurunan pola nafkah yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan

peningkatan kemiskinan, dan perubahan orientasi nilai atas lahan dari segi nilai sosial dan nilai kepentingan umum.

6. Faktor Penyebab Konversi Lahan:

- a. Pertambahan penduduk
- b. Pembangunan
- c. Aksesibilitas masyarakat
- d. Benturan kepentingan antar subjek agraria

7. Dampak Konversi (Tata Guna Lahan dan RTRW):

- a. Orientasi nilai terhadap lahan
- b. Pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan
- c. Tumpang tindih/penyimpangan terhadap RTRW

Nilai ekonomi lahan menurut Barlowe (1978) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sewa lahan (contract rent) sebagai pembayaran aktual dari penyewa kepada pemilik dimana pemilik melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu.
- b. Keuntungan usaha (economic rent atau land rent) merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input lahan yang memungkinkan faktor produksi lahan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi.

B. Pengertian Alih Fungsi

(Lestari 2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi

kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

Proses alih fungsi lahan pada umumnya didahului oleh adanya proses alih penguasaan lahan. Dalam kenyataannya, di balik proses alih fungsi lahan umumnya terdapat proses memburuknya struktur penguasaan sumberdaya lahan. Permasalahan di seputar proses alih penguasaan lahan adalah :

- a. proses yang asimetrik antara pihak yang melepas hak dengan yang menerima hak penguasaan lahan
- b. kecenderungan semakin terkonsentrasinya struktur penguasaan lahan pada kelompok masyarakat tertentu (distribusi penguasaan yang semakin memburuk)
- c. bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan

Struktur sosial-ekonomi yang asimetrik antara yang melepas (seringkali secara terpaksa) hak dan dengan yang penerima hak penguasaan

menyebabkan manfaat peningkatan land rent dari proses alih fungsi dan pengembangan lahan sebagian besar dinikmati oleh penguasa berikutnya atau pihak-pihak pengambil rente dari proses alih penguasaan (calo tanah, dan aparat desa/pemerintah). Sedangkan kalangan masyarakat lokal dan petani yang kehilangan akses penguasaan atau yang menjual lahan menerima harga yang rendah. Proses alih fungsi lahan pada dasarnya bagian dari proses yang menyertai terjadinya konsentrasi penguasaan sumberdaya, khususnya sumberdaya lahan.

Kecenderungan umum di negara-negara dunia ketiga secara signifikan adalah terjadinya penguasaan sumberdaya lahan terbaik pada sekelompok minoritas terkaya. Di sisi lain, bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan, umumnya tanpa disertai transformasi struktur ketenagakerjaan dari struktur agraris ke struktur urban sehingga menimbulkan kemiskinan dan penyakit penyakit urbanisasi.

Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi
- b. daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan
- c. akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering
- d. pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama ekosistem pertanian dominan areal persawahan).

Dengan melihat beberapa pandangan para ahli tentang kebijakan maka dapat disimpulkan kalau kebijakan itu adalah (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan sebagai keputusan yang mana keputusan ini untuk kepentingan masyarakat sehingga mereka memahami bahwa kebijakan yang efektif sangatlah penting agar kepentingan bersama dalam hal menjaga ketahanan pangan. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap bagaimana kita menyikapi kebijakan kebijakan yang ada dan bagaimana kita menerapkan kebijakan tersebut sehingga apa yang kita harapkan dari kebijakan dapat kita terapkan dengan baik demi kepentingan masyarakat. begitu pula alih fungsi lahan adalah berubahnya fungsi awal suatu lahan ke fungsi yang lain.

C. Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Implementasinya.

(Menurut Jayadinata 1999) Ruang adalah seluruh permukaan bumi termasuk lapisan biosfer tempat kehidupan bagi makhluk hidup. Ruang dapat diartikan sebagai suatu wilayah dengan batas geografi tertentu yang terdiri dari lapisan tanah dibawahnya dan lapisan udara diatasnya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Hal ini membuat ruang menjadi bagian dari objek agraria atau sumber-sumber agraria.

Penggunaan lahan dapat berarti pula tata ruang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang Penataan Ruang, ruang itu termasuk daratan, lautan, angkasa, dan penataan ruang bertujuan agar terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Ruang merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dimana ruang setiap waktunya berubah akibat proses alam dan tindakan manusia.

Menurut Mabogunje dalam Jayadinata (1999), terdapat tiga macam ruang yaitu:

- a. Ruang mutlak, yang merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di dalam ruang tersebut. Contohnya ruang permukaan bumi adalah wadah bagi benua, laut, dan gunung.

- b. Ruang relatif, dapat digambarkan, yaitu apabila ada dua kota berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat pengangkut yang menghubungkan dua kota tersebut.
- c. Ruang relasi, merupakan ruang yang melibatkan unsur-unsur yang memiliki relasi satu sama lain dan saling berinteraksi. Pengertian dari ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan.

Untuk memanfaatkan ruang agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu penataan bagi ruang, atau rancangan penataan ruang.

Penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, tetapi termasuk juga dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- a. Perencanaan Tata ruang, yang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang nya.

Dalam penataan ruang, dibutuhkan suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dalam hal ini merupakan landasan pembangunan sektoral. Dengan tujuan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor-sektor yang berkepentingan dan dampak yang dapat merugikan masyarakat luas (*externalities*).

Rencana tata ruang biasanya dimanfaatkan untuk membagi ruang yang ada di dalam suatu wilayah menjadi bagian-bagian tertentu, seperti pemukiman, tempat perdagangan (pasar), industri khusus daerah perkotaan, lokasi pertanian khusus daerah pedesaan dan juga ruang terbuka hijau. Alokasi ruang terbesar dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80/1999 mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman (KSNPP) bahwa perumahan dan pemukiman tidak dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkan, terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana (utilitas umum).

Pada kenyataannya masih banyak pemanfaatan lahan perumahan dan pemukiman belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kadangkala izin lokasi pemanfaatan lahan perumahan dan pemukiman tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, sehingga meningkatkan luas area lahan tidur (*vacant land*). Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan pemukiman kadangkala juga belum sesuai dengan pengembangan kawasan fungsional lainnya, seperti kawasan kritis dan terbelakang. Permasalahan yang paling kritis dalam pemanfaatan ruang merupakan konflik penggunaan lahan antara penggunaan pemukiman dengan penggunaan kawasan lindung.

Tidak meratanya pembangunan antara pedesaan dan perkotaan menyebabkan timbulnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Hal ini juga memberikan pengaruh kepada ketidaksihinggaan RTRW yang sudah ditetapkan, karena dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah dan terbatasnya lahan yang ada, maka menimbulkan potensi munculnya pemukiman kumuh yang nantinya akan menimbulkan masalah sosial. Pemukiman kumuh itupun kebanyakan tumbuh di atas lahan yang sudah mempunyai tujuan pemanfaatan.

Khusus untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.10/2011 mengenai penundaan memberikan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- a. Bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. Bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. Bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat.

Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Hal yang sama pun terjadi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang juga merupakan daerah pertanian mempunyai peranan yang besar terhadap ketahanan pangan oleh karena itu pemerintah mesti menjaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan. karena apabila terjadi alih fungsi lahan dan tidak segera diatasi maka lahan pangan dari Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentu akan semakin berkurang hal ini akan membawa dampak terhadap ketahanan pangan Nasional. Berdasarkan paradigma tersebut, maka perlunya kebijakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi ancaman kurangnya lahan pangan di Sulawesi Selatan.

D. Teori Akses

Akses (menurut Peluso dan Ribot 2003) merupakan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu (*ability to derive benefits from things*) termasuk diantaranya dari objek material, orang lain, lembaga, dan simbol. Permasalahan akses bisa dilihat dalam tatanan hubungan sosial yang lebih luas (*bundle of powers*). Akses melambangkan seseorang mampu memperoleh keuntungan dari sumber daya tanpa mengindahkan ada tidaknya hubungan sosial yang lebih luas (*bundle of right*). Konsep akses memfasilitasi analisis dasar mengenai siapa yang memanfaatkan

(dan tidak memanfaatkan) sesuatu, dengan cara seperti apa, dan kapan (dalam situasi apa). Sehingga analisis akses dapat dikatakan sebagai proses untuk mengidentifikasi dan memetakan mekanisme perolehan, pemeliharaan, dan pengendalian akses.

Analisis akses digunakan untuk menganalisis konflik terhadap sumberdaya tertentu untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana konflik bisa menjadi sarana antar aktor yang berbeda-beda untuk memperoleh atau kehilangan keuntungan dari sumberdaya, baik yang *tangible* maupun *intangible*. Dalam menganalisis akses, menurut Peluso dan Ribot (2003) terdapat beberapa proses, yaitu: 1). Identitas dan pemetaan alur keuntungan dari kepentingan masing-masing aktor, 2). Identifikasi mekanisme masing-masing aktor yang meliputi perolehan, pengendalian, dan pemeliharaan alur dan distribusi keuntungan; dan 3). Analisis hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme akses yang melibatkan instansi-instansi dimana keuntungan diperoleh.

Kegunaan analisis akses lainnya adalah untuk menganalisis kebijakan lingkungan tertentu yang membuat para aktor mampu dan tidak mampu memperoleh, memelihara, atau mengendalikan akses sumberdaya atau dinamika-mikro dari siapa yang mendapatkan keuntungan dari sumberdaya serta bagaimana caranya. Kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sumberdaya ditengahi dengan adanya pembatas-pembatas yang telah ditetapkan dalam konteks politik ekonomi dan kerangka budaya saat pencarian akses berlangsung. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai “mekanisme akses struktural dan saling terhubung” (*structural and relational mechanisme of access*).

Terdapat beberapa mekanisme akses (menurut Peluso dan Ribot 1999 dalam Elisabeth 2003), yaitu:

a. Akses Teknologi

Kebanyakan sumberdaya hanya bisa diekstraksi dengan menggunakan teknologi, mereka yang memiliki akses terhadap teknologi yang lebih tinggi akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan yang tidak memiliki.

b. Akses Kapital/Modal

Akses ini sering juga disebut sebagai akses terhadap kekayaan dalam bentuk keuangan dan peralatan (termasuk juga teknologi) yang bisa digunakan dalam proses ekstraksi, produksi, konversi, mobilisasi buruh, dan proses lain yang sejalan dengan pengambilan keuntungan dari sesuatu atau orang lain. Akses kapital/modal bisa digunakan untuk mengendalikan atau memelihara akses sumberdaya.

c. Akses Pasar

Akses pasar didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, mengendalikan ataupun memelihara gerbang hubungan pertukaran. Pasar mampu mempertajam akses pada keuntungan dari sesuatu pada skala yang berbeda secara tidak langsung dan tidak kentara. Semakin luas dan besar kekuatan pasar untuk memasok, mengajukan permintaan, dan mempengaruhi harga juga membentuk distribusi keuntungan dari sesuatu.

d. Akses Buruh dan Peluang Buruh

Kelangkaan buruh dan surplus mampu mempengaruhi porsi hubungan dalam pencarian keuntungan sumberdaya yang bisa dinikmati oleh siapa saja yang mampu mengendalikan buruh. Mereka yang mampu mengendalikan akses peluang buruh dan mereka yang berhasrat untuk mempertahankan akses terhadap peluang-peluang tersebut.

e. Akses Pengetahuan

Wacana dan kemampuan untuk mempertajam terminologi sangat mempengaruhi keseluruhan kerangka kerja akses terhadap sumberdaya

f. Akses Kewenangan

Individu atau lembaga yang memiliki akses *privilege* dengan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan hukum akan sangat berpengaruh terhadap siapa yang memperoleh keuntungan dari sumberdaya. Akses kewenangan merupakan hal yang penting dalam jaring kekuasaan yang membuat seseorang mampu mengambil keuntungan dari sesuatu.

g. Akses Identitas Sosial

Akses sering ditengahi dengan identitas sosial atau keanggotaan dalam komunitas atau kelompok, termasuk di antaranya pengelompokan menurut umur, gender, suku, agama, status, profesi, tempat kelahiran, pendidikan, ataupun atribut-atribut lain yang menunjukkan identitas sosial.

h. Akses Hubungan Sosial

Akses melalui negosiasi hubungan sosial seperti pertemanan, saling percaya, timbal balik, patron, ketergantungan, dan obligasi merupakan poin-poin kritical dalam jejaring akses.

E. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Oleh karenanya dalam pembahasan ini peneliti menyajikan teori-teori kebijakan publik, pendekatan dalam studi kebijakan publik hingga

proses kebijakan publik. Karena hakekatnya Instruksi Presiden No.3/1990 mengenai larangan alih fungsi lahan sawah untuk penggunaan selain pertanian serta Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2009 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik.

(Menurut H. Hugh Heglo dalam Abidin) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson dalam Islami mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari kedua penjelasan diatas dapat ditarik konsep dasar bahwa : kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Sebagaimana penjelasan Irfan Islamy kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas.

Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linier pada sebuah kebijakan yaitu : *policy innovation – policy succession – policy maintenance – policy termination*. *Policy innovation* adalah saat di mana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. *Policy succession*, setelah aspirasi itu ditangkap maka pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. *Policy maintenance* adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk *keep the policy on track*. *Policy termination* adalah saat dimana kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan.

Terdapat berbagai macam strategi untuk menghentikan kebijakan, apakah itu dengan mencabut kebijakan, membatalkannya, atau menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Substansi utama dari proses linier yang digagas oleh Hogwood dan Peters secara lugas mendeskripsikan kepada kita bahwa kebijakan publik merupakan siklus yang mekanistik.

Dalam konsep lainnya seorang pakar bernama William N. Dunn mengatakan proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis itu nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Sementara aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang lebih bersifat intelektual, dapat diamati melalui tabel berikut

Tabel 3.Proses Kebijakan Publik

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Sumber : AG. Subarsono

Jika isu kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan masalah, evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat

diatasi. Salah satu perbedaan pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu kebijaksanaan disiapkan sebelum tindakan dilakukan (bersifat prospektif), sedangkan program evaluasi kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan oleh William N. Dunn ini menjadi dasar pemikiran untuk menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksanaan dimulai dengan menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatif, dan pembuatan usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang dengan berhasil membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, sikap alternatif kebijaksanaan yang baru, dan kerangka arah tindakan yang baru atau diperbaharui, meskipun evaluasi program kebijaksanaan normalnya berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit.

Berbagai argumentasi Dunn diatas merupakan bahan pertimbangan yang menyebabkan peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode-metode “evaluasi kebijakan” daripada “analisis kebijakan”. Karena dengan melakukan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan, outputnya akan menghasilkan rekomendasi tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, maka tentunya sumbangsih terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih konkrit. Sementara analisis kebijakan lebih bersifat peramalan (forecasting) yang belum dapat dipastikan hasilnya.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan pemahaman di atas konklusi dari implementasi jelas mengarah kepada pelaksanaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi ini harus digaris-bawahi ada kata-kata “rangkaiannya terstruktur” yang memiliki makna bahwa dalam prosesnya implementasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrumen.

“Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implementasi kebijakan Lineberry menspesifikasikan proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana

- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

Salah satu komponen utama yang ditonjolkan oleh Lineberry, yaitu pengambilan kebijakan (*policy-making*) tidaklah berakhir pada saat kebijakan itu dikemukakan atau diusulkan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan hanyalah merupakan sebuah awal dan belum dapat dijadikan indikator dari keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak dan konseptual. Namun ketika telah masuk di dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kebijakan akan diketahui.

Bahkan Udoji dalam Abdul Wahab dengan tegas mengatakan *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Oleh karenanya ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi merupakan unsur yang sangat penting sebagai kontinuitas dari munculnya suatu kebijakan.

Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek kebijakan baik itu masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka

bermunculanlah dampak-dampak sebagai akibat dari kebijakan yang dimaksud. Islamy mengatakan bahwa “Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*)”. Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain pencapaian tujuan harus diupayakan pula untuk meminimalisir ketidakpuasan (*dissatisfaction*) dari seluruh stakeholder. Dengan demikian deviasi dari kebijakan tidak terlampau jauh dan niscaya akan mencegah terjadinya konflik di masa akan datang.

2. Aspek Kebijakan Dalam Alih Fungsi Lahan

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Akan tetapi, hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal. Menurut Iqbal dan (Sumaryanto 2007) hal ini antara lain karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut. Terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu :

- a. Kendala Koordinasi Kebijakan. Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.
- b. Kendala Pelaksanaan Kebijakan. Peraturan-peraturan pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke nonpertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum

tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

- c. Kendala Konsistensi Perencanaan RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi nonpertanian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) dalam konteks pembangunan di Pulau Jawa, jumlah keluarga atau rumah tangga yang hidup dari sektor nonpertanian mencapai 100%. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada perubahan pola pemanfaatan lahan pertanian di Pulau Jawa yaitu faktor privatisasi pembangunan kawasan industri, pembangunan pemukiman skala besar dan kota baru, serta deregulasi investasi dan kemudahan perizinan. Tiga kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian ialah:

- a. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 yang telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar. Dampak kebijakan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan sejak tahun 1989, yang telah berorientasi pada lokasi subur dan menguntungkan dari ketersediaan infrastruktur ekonomi.
- b. Kebijakan pemerintah lainnya yang sangat berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan pertanian ialah kebijakan pembangunan permukiman skala besar dan kota baru. Akibat ikutan dari penerapan kebijakan ini ialah munculnya spekulasi yang mendorong minat para petani menjual lahannya. Sehingga terlihat bahwa sering sekali terjadi ketidakserasian antar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk

mengatasi alih fungsi yang justru sering sekali justru meningkatkan laju alih fungsi lahan terutama lahan sawah.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden No.3/1990 sebagai variabel yang diteliti, merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kebijakan yang ada. Untuk itulah peneliti menggunakan teori-teori implementasi kebijakan sebagai kerangka pikir dalam memahami makna dari variabel tersebut. Dan agar dapat dimaknai dengan benar oleh setiap orang yang menggunakan penelitian ini, maka peneliti berupaya menjabarkannya dengan melakukan pemilahan makna dari setiap variabel yang dimaksud.

4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, yang dianggap relevan dengan materi pembahasan, dari objek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasikan teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini, sehingga membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian ini.

Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi. Yang disampaikan, pengetahuan atas hal-hal yang mereka kerjakan dapat

berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Trasmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses tranmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Dalam faktor ini meliputi 4 komponen, yaitu:

- 1) Staf (staff), dimana kuantitas dan kualitas pelaksana yang memadai merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan.
- 2) Informasi (information) yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan
- 3) Kewenangan (authority) tugas dan tanggung jawab
- 4) Fasilitas (facilities) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, dimana seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa fasilitas yang mendukung untuk melakukan koordinasi, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

c. Disposisi atau attitudes

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementari dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edward III menyatakan bahwa dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari sikap birokrat/pelaksana yang seringkali mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah dibuat, yaitu:

- 1) Penempatan pegawai (staffing the bureaucracy), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Apabila mendapat masalah dalam implementasi kebijakan khususnya dari para perilaku aparat birokrasi pelaksana. Hal ini diselesaikan dengan mempertimbangkan pengangkatan eksekutif, sistem pelayanan publik, sistem aturan kepegawaian dan metode-metode personel yang sudah ada.
- 2) Insentif (incentives) dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah insentif. Manipulasi atau mengubah insentif pembuat kebijakan pada level atas diharapkan dapat mempengaruhi kinerja atau tindakannya.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edward II menyatakan bahwa aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:

- 1) Adanya suatu SOP (Standard Operation Prosedure) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik (seseorang dapat dipindahkan dari suatu

lokasi ke lokasi yang lain) serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan.

- 2) Fragmentasi (fragmentation) adalah adanya penyebarab tanggung jawab suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Adapun akibat dai adanya fragmentasi, yaitu menyebabkan penyebaran tanggung jawab dan hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

F. Kerangka Pemikiran

Tanah merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai ekonomis. Luasan tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat sehingga timbul alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti perumahan, industri, infrastruktur dan lain sebagainya untuk memenuhi permintaan yang ada. Alih fungsi lahan yang terjadi tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan komunitas (masyarakat). Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Masalah alih fungsi lahan pertanian terus meningkat dan sulit dikendalikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan ekonomi tinggi. Laju alih fungsi lahan yang tinggi pada daerah pusat perekonomian ataupun yang berada disekitar pusat perekonomian menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian pada penggunaan

nonpertanian. Tekanan terhadap lahan pertanian tersebut berwujud terhadap penyempitan rata-rata penguasaan lahan oleh petani. Keadaan tersebut jelas tidak kondusif bagi keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional dalam jangka panjang. Pembukaan areal baru yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat juga menjadi faktor pendorong semakin meningkatnya laju alih fungsi lahan selain petani sendiri kurang memiliki motivasi atau keinginan yang cukup kuat untuk mempertahankan lahan sawahnya. Kondisi atau dorongan ekonomi bisa menjadi motivasi atau faktor pendorong petani untuk mengalihfungsikan lahannya.

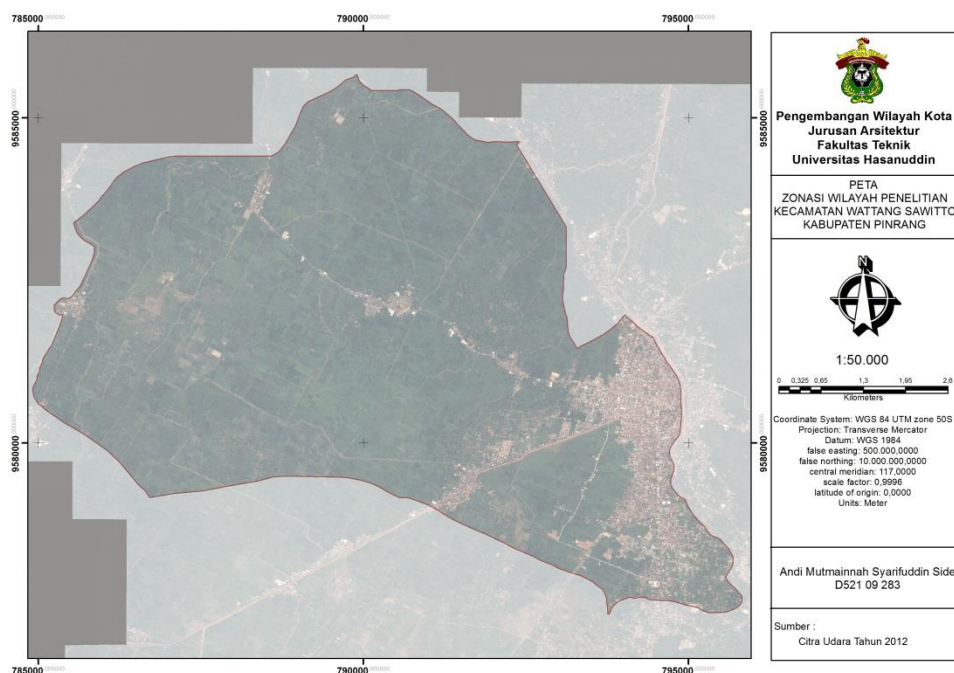
Kecamatan Watang Sawitto adalah salah satu kecamatan yang dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terus mengalami alih fungsi lahan yang mengakibatkan luas lahan pertanian di Kecamatan Watang Sawitto cenderung mengalami penurunan. Lahan yang paling banyak beralih fungsi adalah jenis lahan sawah, yang beralih fungsi menjadi lahan kering serta lahan non pertanian. Laju alih fungsi dilihat berdasarkan data luas lahan sawah di Kecamatan Watang Sawitto yang diperoleh dari BPS serta berdasarkan motivasi petani dalam mempertahankan maupun mengalihfungsikan lahannya. Proyeksi luas lahan sawah dan produksi padi akan dianalisis trennya melalui kecenderungan laju alih fungsi secara regresi linier sederhana. Hasil proyeksi ini nantinya akan menjadi alat analisis untuk melihat dampak alihfungsi terhadap kecukupan pangan di Kecamatan Watang Sawitto sepuluh tahun yang akan datang dengan kondisi alih fungsi lahan sawah sekarang.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan lima aspek, yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian, kedua tipe dan dasar penelitian, ketiga jenis data, keempat teknik pengumpulan data, kelima adalah teknik analisis data.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yaitu pada Bulan Juni 2013 di Kab.Pinrang.Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang merupakan lokasi yang strategis untuk melihat kebijakan yang ada.Objek Penelitian ini yaitu pemerintah yang terkait dengan pengambil kebijakan tentang Alih Fungsi Lahan dan Pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Pinrang.yang dapat menunjang hasil penelitian



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber : Citra Udara Tahun 2012

Batas Lokasi Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Paleteang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Sompe dan
Cempa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tiroang dan Paleteang

B. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta dan argument yang tepat. Penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan luas penggunaan lahan serta dampaknya terhadap besarnya permintaan lahan permukiman 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian ini adalah Analisis kebijakanyaitu dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian. Dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis memperoleh pendapat atau opini atau pendapat tentang kebijakan yang ada dan langkah yang ditempuh dalam menyikapi permasalahan yang ada, melalui komunikasi langsung dengan para informan.

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka dan Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada.

2. Teknik Observasi,

yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mengenali karakteristik dan kondisi eksisting objek pengamatan di lokasi studi yang disesuaikan dengan kebutuhan data.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Kuantitatif

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan cara mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan demikian hasil olahan data dengan teknik analisis ini hanya sampai pada tahap deskripsi, belum

sampai pada tahap generalisasi. Dengan demikian, analisis deskriptif kuantitatif adalah teknik analisis yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu gejala peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau kesimpulan tertentu.

Dalam penelitian ini, data yang dimaksud adalah data berupa luas suatu penggunaan lahan pada kurun waktu tertentu, yaitu data luas penggunaan Kecamatan Watang Sawitto tahun 2006, 2009 dan 2012. Yang didapatkan setelah melalui proses analisis spasial yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses analisis ini, keluaran yang diharapkan adalah perbandingan luas penggunaan lahan tahun 2006, 2009 dan 2012.

2. Analisis Spasial

Analisis Spasial dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis spasial dilakukan secara multi temporal, yang dalam penelitian ini menggunakan data citra udara Kecamatan Watang Sawitto tahun 2006, 2009 dan 2012. Keluaran dari analisis ini adalah tiga buah peta penggunaan lahan untuk tahun 2006, 2009 dan 2012. Ketiga peta ini kemudian akan dibandingkan untuk mengetahui perubahan penggunaan apa saja yang telah terjadi dalam kurun waktu tersebut.

3. Analisis Retrospektif

Dimana analisis ini berorientasi pada masalah dan berorientasi pada aplikasi atau implementasi suatu kebijakan. Proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan caramenajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi oleh peneliti. Dalam tahapan ini penulis melakukan pemilihan berupa data yang penting dengan yang kurang penting. Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.

b. Sajian data.

Dalam sajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar. Penyajian data tidak terpisahkan dari analisis justru penyajian data akan menentukan suatu analisa.

Pada tahap penyajian data penulis mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).

Dengan melakukan sajian data penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi terhadap efektifitas kebijakan terhadap Alih Fungsi Lahan dan Pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Pinrang , semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara sistematis.

c. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Berbagai hal yang ditemui dalam proses pengumpulan data mengenai Alih Fungsi Lahan dan Pengaruhnya terhadap Rencana Tata

Ruang dan Wilayah di Kabupaten Pinrang akan penulis catat dan diverifikasi. Hal yang harus dilakukan pada penarikan kesimpulan akhir adalah mendiskusikan cara untuk mengembangkan apa yang disebut consensus antar subjektif

F. Variabel Penelitian

Tabel 4. Variabel Penelitian

Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Sumber Data	Analisis
1. Seberapa besar perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian pada periode 2006-2012	Sosial	c. Jumlah penduduk d. Peta penggunaan lahan tahun 2006, 2009 dan 2012 di Kecamatan Watang Sawitto	e. BPS, Bapeda f. Wawancara	g. Deskripsi h. Spasial
2. Seberapa besar permintaan lahan permukiman pada 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto?	Sosial Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk eksisting tahun 2006, 2009, 2012. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, 2018, 2021 Kepmen Perumahan dan Prasarana wilayah No.403/KPTS/M/2002 	<ul style="list-style-type: none"> BPS SNI No.03/1733/2004 	Analisis statistik

G. Kebutuhan Data

Berikut Tabel Kebutuhan Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

Tabel 5. Kebutuhan Data

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode
1.	Jumlah Penduduk	Sekunder	Mengumpulkan data sekunder
2.	Peta citra udara Kecamatan Watang Sawitto tahun 2006, 2009 dan 2012	Sekunder	Digitasi citra udara dengan software
3.	RTRW Kabupaten Pinrang tahun 2012-2032	Sekunder	Mengumpulkan data sekunder

H. Kerangka Penelitian

Tabel 6. Kerangka Penelitian

Input	Analisis	Output
-------	----------	--------

Input	Analisis	Output
<p>Latar belakang :</p> <p>Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Namun disisi lain luas lahan di suatu wilayah tidak akan pernah bertambah. Kecamatan Watang sawitto selaku ibukota Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan yang cukup pesat, pembangunan pusat-pusat kegiatan di beberapa titik di Kota Pinrang membuat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, perkantoran dan komersil begitu banyak terjadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digitasi Citra • Tabulasi data luas perubahan penggunaan lahan 	<p>Peta perubahan per Kecamatan Watang Sav 2009, dan 2012.</p> <p>Luas penggunaan lahan Kecamatan Watang Sav dan 2012.</p>
<p>Tinjauan pustaka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk tahun 2006, 2009 dan 2012 	<p>Proyeksi penduduk dengan menggunakan grafik Scatter Exponential</p>	<p>Proyeksi penduduk tahun</p>

Tabel 6.Kerangka Penelitian

Input	Analisis	Output
<p>Latar belakang :</p> <p>Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Namun disisi lain luas lahan di suatu wilayah tidak akan pernah bertambah. Kecamatan Watang sawitto selaku ibukota Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan yang cukup pesat, pembangunan pusat-pusat kegiatan di beberapa titik di Kota Pinrang membuat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, perkantoran dan komersil begitu banyak terjadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digitasi Citra • Tabulasi data luas perubahan penggunaan lahan 	<p>Peta perubahan per Kecamatan Watang Sav 2009, dan 2012.</p> <p>Luas penggunaan lahan Kecamatan Watang Sav dan 2012.</p>
<p>Tinjauan pustaka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk tahun 2006, 2009 dan 2012 	<p>Proyeksi penduduk dengan menggunakan grafik Scatter Exponential</p>	<p>Proyeksi penduduk tahun 20</p>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kab.Pinrang

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Pinrang merupakan wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat antara 3°19'13" sampai 4°10'30" Lintang Selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" Bujur Timur. Daerah ini berada pada ketinggian 0-2.600 meter dari permukaan laut. Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar, dengan memiliki luas ±1.961,77 Km², terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi dataran rendah, laut dan dataran tinggi.

Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

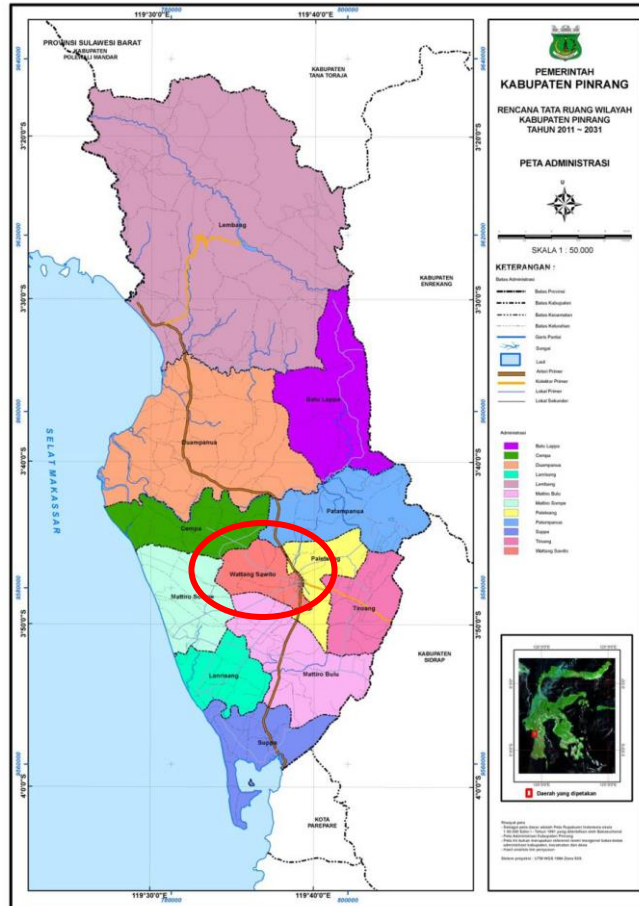
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap.

Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar.

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kota Parepare.

2. Administrasi Kab.Pinrang



Gambar 2. Peta Admintrasi Kab.Pinrang
Sumber : Bappeda Kab. Pinrang

3. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Pinrang secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa yang meliputi 96 Lingkungan dan 181 dusun. Sebagian besar dari wilayah kecamatan merupakan daerah pesisir yang memiliki luas 1.457,19 Km² atau 74,27% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pinrang dengan panjang garis pantai \pm 101 Km.

4. Ketinggian.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0-2000 m dari permukaan laut, yaitu (0-49 m) : 434,29 Km² (10,10%) lebih dari 400 m : 1122,69 Km² (57,23%).

5. Kependudukan

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sementara adalah 350.807 orang, yang terdiri atas 170.095 laki-laki dan 180.712 perempuan. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Pinrang bertumpu di Kecamatan Watang Sawitto yakni sebesar 14,5 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Duampanua sebesar 12,5 persen, Kecamatan Lembang sebesar 10,8 persen, Kecamatan Paleteang sebesar 10,5 persen dan kecamatan lainnya di bawah 10 persen.

Batulappa, Lanrisang, dan Cempa adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 9.653 orang, 17.137 orang, dan 17.213 orang. Sedangkan Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 50.974 orang dan 36.648 orang.

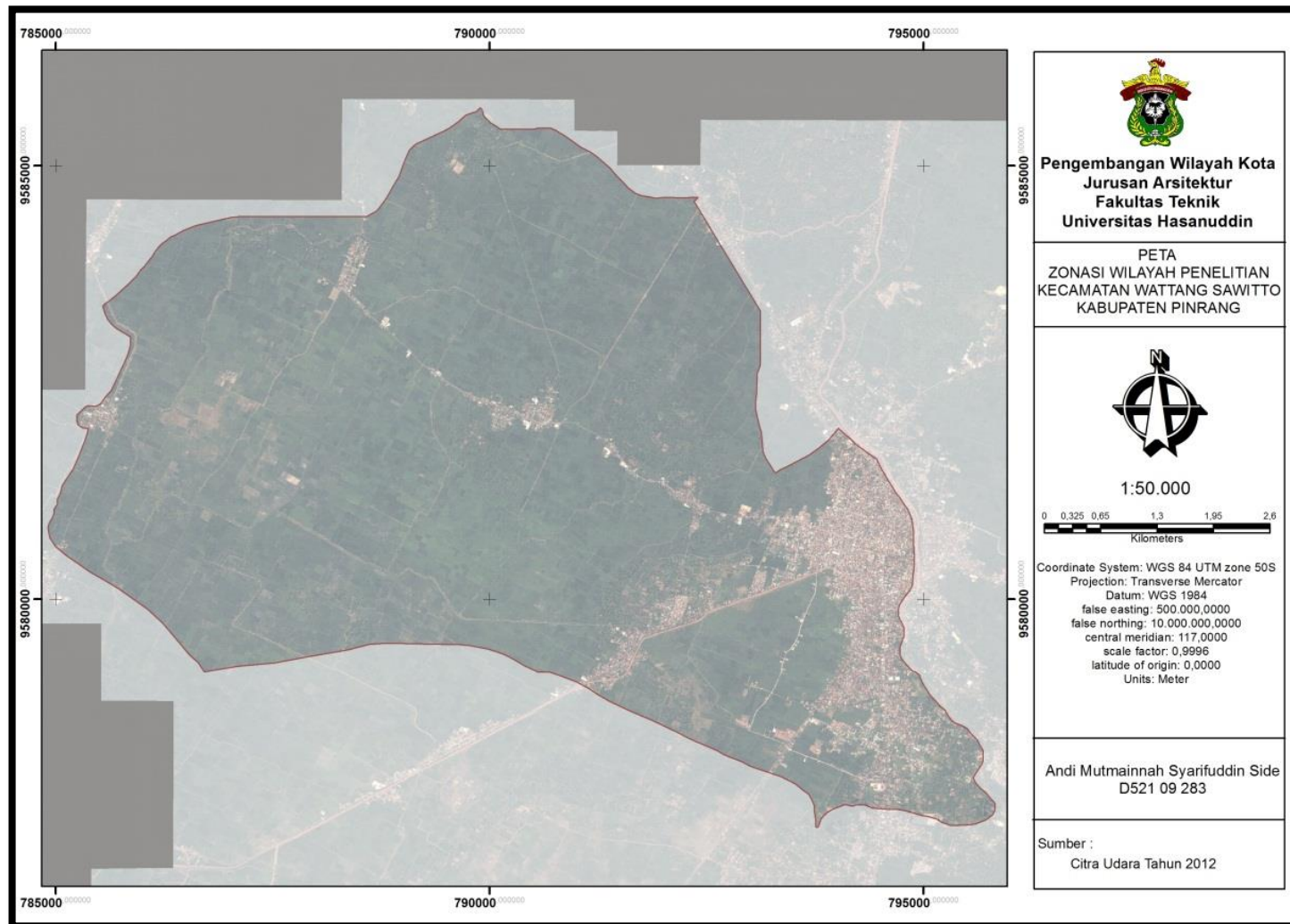
B. Gambaran Umum Kecamatan Watang Sawitto

1. Keadaan Wilayah

Kecamatan Watang Sawitto merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pinrang, yang memiliki luas wilayah 58,97 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Paleteang
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu
- c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Sompe dan Cempa
- d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Tiroang dan Paleteang

Lokasi Penelitian dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3.Peta Lokasi Penelitian
Sumber : Citra Udara Tahun 2012

Luas Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan luas wilayah Desa/Kelurahan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 7. Luas wilayah Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan luas tiap kelurahan

Kelurahan	Luas (Km ²)	Presentase (%)	Lingkungan	ORW	ORT
Siparappe	24,21	41,1	3	6	12
Salo	9,17	15,5	2	2	7
Sipatokkong	7,46	12,6	2	8	16
Penrang	2,37	4,1	2	10	22
Jaya	1,22	2,1	2	7	14
Sawitto	0,90	1,5	1	5	11
Maccorawalie	4,35	7,4	3	6	12
Bentengnge	9,29	15,7	2	7	13
Jumlah	58,97	100 %	17	51	107

Sumber : Kantor Kecamatan Watang Sawitto

Dari data di atas menggambarkan bahwa tanah Kecamatan Watang Sawitto seluas 58,97 Km²(lima puluh delapan koma sembilan tujuh kilometer persegi) sangat signifikan untuk dilakukan sebuah kehidupan dan peradaban yang maju di Kecamatan Watang Sawitto.

2. Topografi

Kecamatan Watang Sawitto merupakan tanah datar 71,5% dengan kemiringan 13,5%, ketinggian lahan berkisar 500 M diatas permukaan laut dengan pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan sebagai perumahan penduduk dan Prasarana penduduk seperti gedung perkantoran pemerintah dan swasta serta pertokoan dan sebagiannya lagi digunakan sebagai daerah pertanian dan peternakan yang terkonsentrasi pada kelurahan-kelurahan yang memiliki daerah pertanian seperti Kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Salo, Kelurahan Sipareappe dan Kelurahan Sipatokkong.

3. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2011 tercatat 52.638 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki 25.757 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 26.881 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin tiap desa/kelurahan hasil registrasi akhir tahun 2011 :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2006-2011

Kelurahan	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Siparappe	3.596	2.398	2.631	2.628	2.765	2.825
Salo	5.056	3.352	3.770	3.358	3.910	4.182
Sipatokkong	4.010	2.586	2.550	2.538	2.698	2.798
Penrang	15.735	10.439	10.453	10.447	12.319	12.417
Jaya	13.110	8.558	7.754	7.750	8.189	8.287
Sawitto	8.915	5.899	4.137	4.230	4.399	4.467
Maccorawalie	10.262	6.702	9.476	9.465	11.450	11.629
Bentenge	5.723	3.563	4.225	4.415	5.985	6.033
Jumlah	43.441	43.497	44.996	44.647	50.974	52.638

Sumber :BPS Kabupaten Pinrang

Dari data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Watang Sawitto yang terdiri dari 52.638 jiwa penduduk, luas tanah 58,97 Km², harus seimbang antara jumlah penduduk dan luas lahan yang ditempati serta yang dikelola demi terjaganya penghidupan dan tempat yang layak di Kecamatan Watang Sawitto.

B. Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006, 2009, hingga tahun 2012

Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari tanah pertanian dan nonpertanian, dimana tanah pertanian yang dimaksud disini adalah lahan persawahan dan lahan kebun campur. Berikut perubahan penggunaan lahan mulai tahun 2006 hingga tahun 2012.

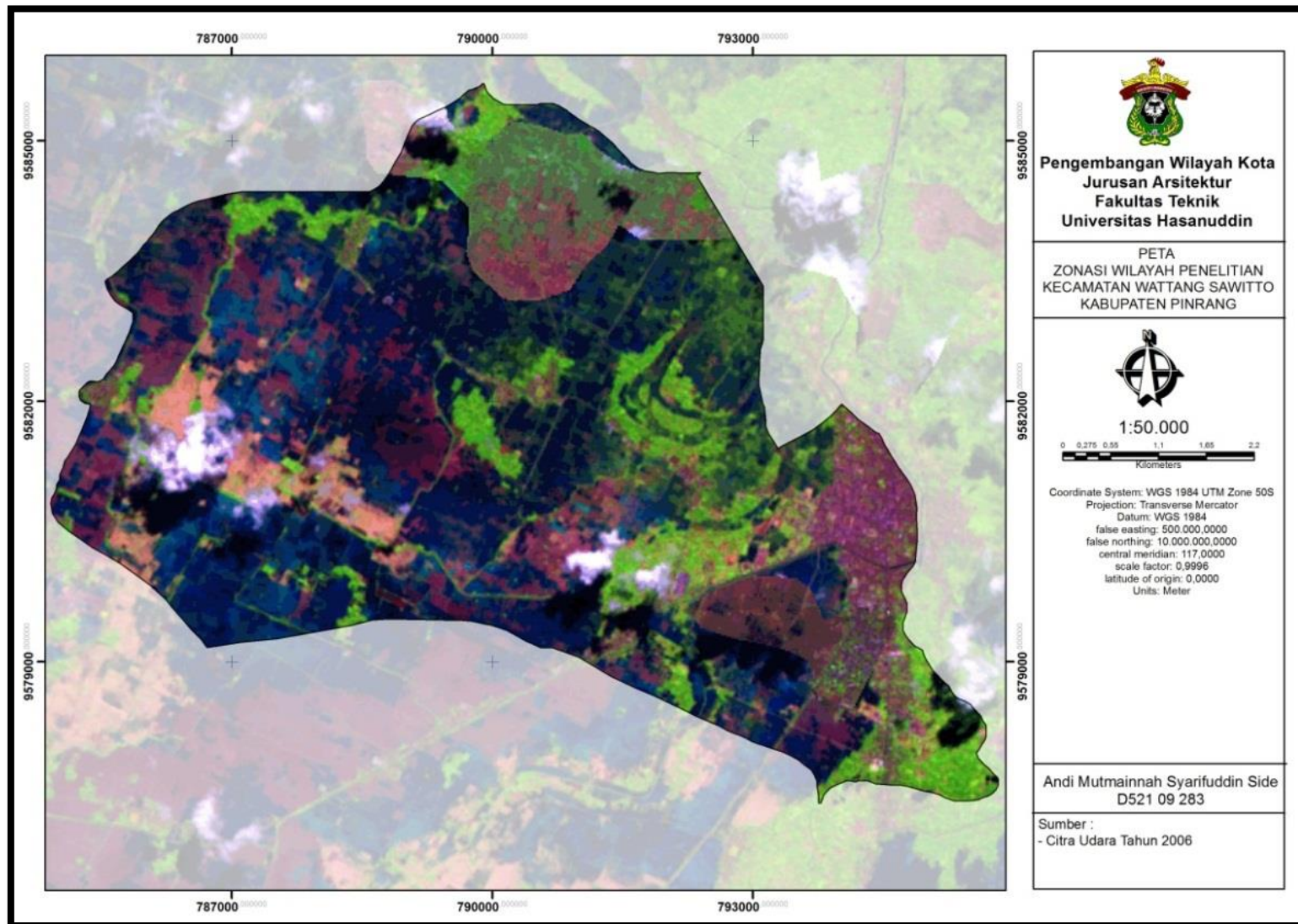
1. Penggunaan Lahan Tahun 2006

Gambar 5 menunjukkan peta penggunaan lahan yang telah dibuat dengan mengacu pada Citra Udara serta survey lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 11.

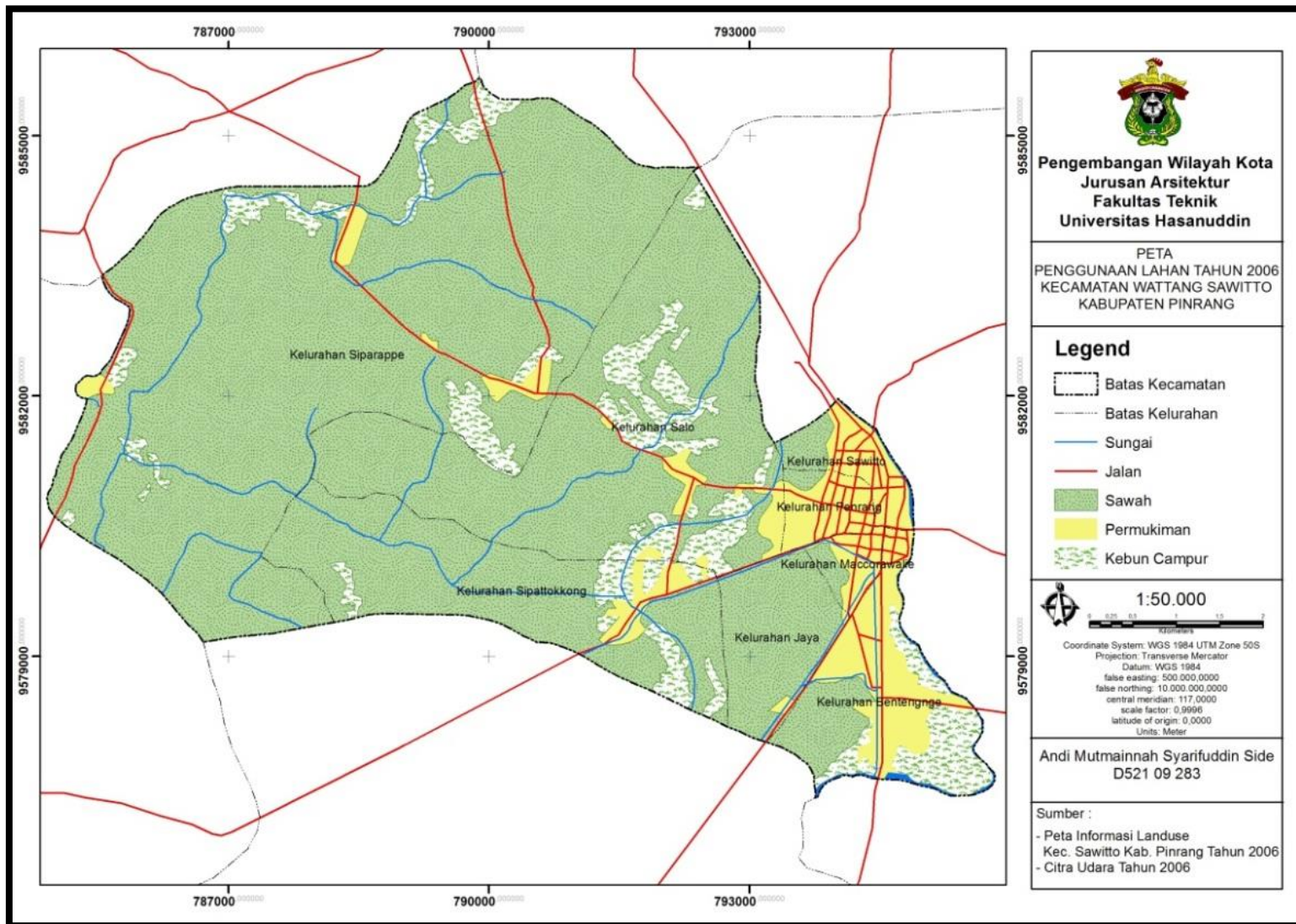
Tabel 11. Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2006

Jenis Lahan	Luas (Km²)	Persentase (%)
Permukiman	5.76	9.77
Kebun Campur	6.20	10.52
Persawahan	47.00	79.72
Jumlah	58.96	100.00

Dari tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa jenis penggunaan lahan terbesar di Kecamatan Watang Sawitto adalah areal Persawahan yaitu sebesar 79.72% dari luas wilayah. Areal Kebun Campur menempati urutan kedua dengan total 10.52% dari luas wilayah Kecamatan Watang Sawitto. Sedangkan Permukiman menempati urutan ketiga dengan luas 9.77% dari total luas wilayah.



Gambar 4. Citra Udara Kecamatan Watang Sawitto tahun 2006
 Sumber: Citra Udara tahun 2006



Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto tahun 2006
 Sumber: *Geografic Information System* dan Peta Citra Udara tahun 2006

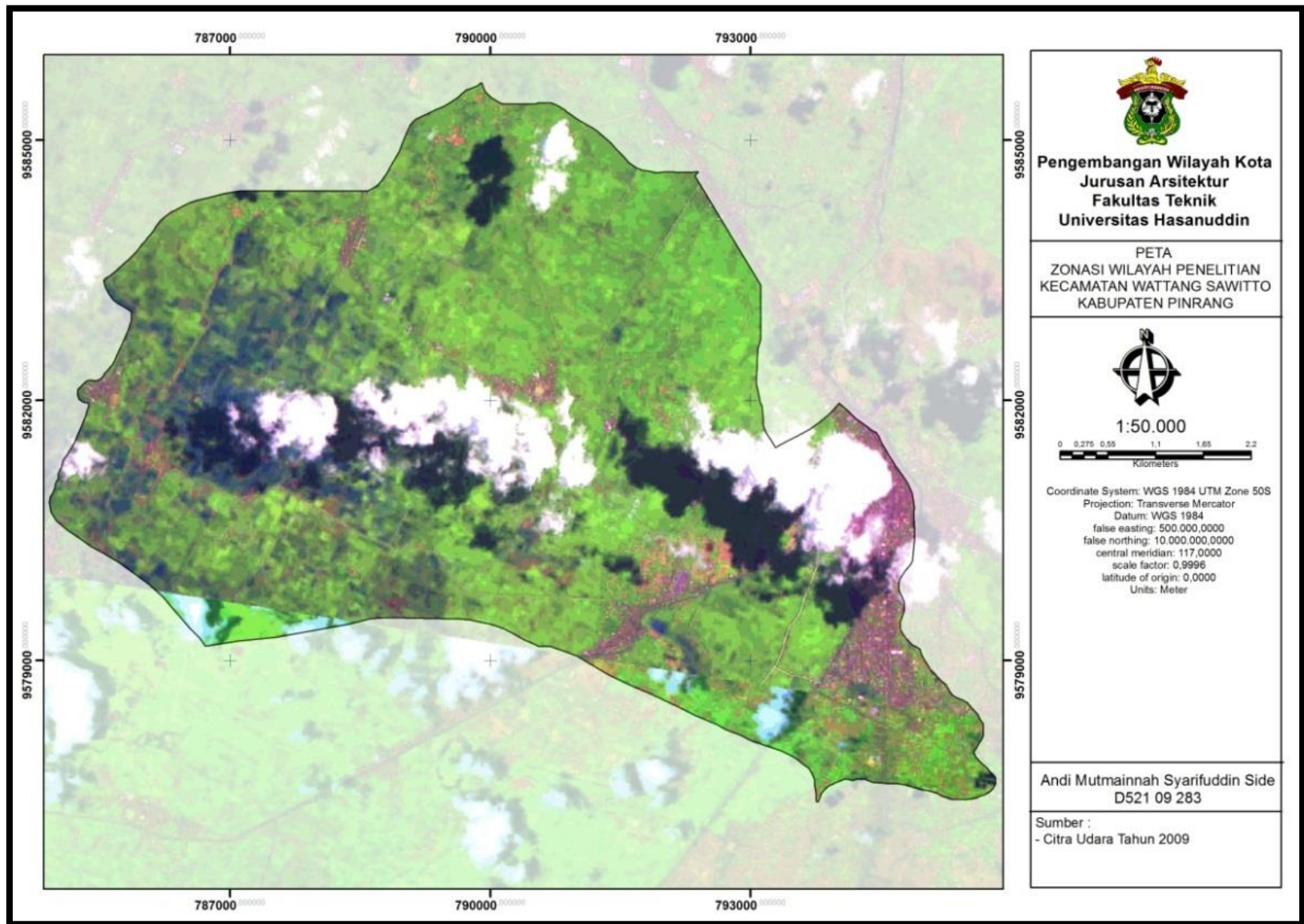
2. Penggunaan Lahan Tahun 2009

Gambar 7 menunjukkan peta penggunaan lahan yang telah dibuat dengan mengacu pada Citra Udara serta survey lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 12.

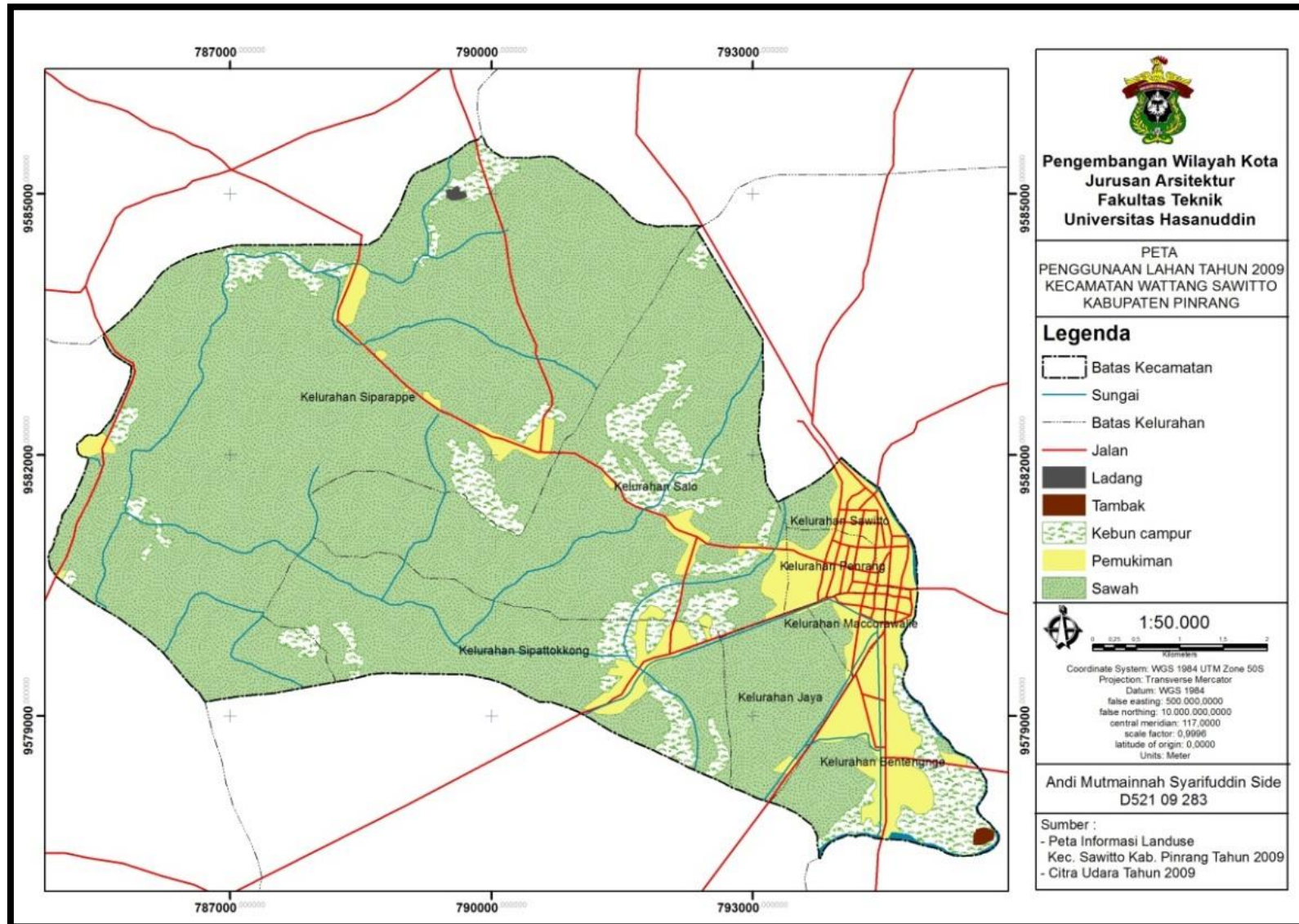
Tabel 12. Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2009

Jenis Lahan	Luas (Km²)	Persentase (%)
Permukiman	5.9	10.01
Kebun Campur	6.2	10.52
Persawahan	46.77	79.32
Tambak	0.05	0.08
Ladang	0.04	0.07
Jumlah	58.96	100.00

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa jenis penggunaan lahan di Kecamatan Watang Sawitto mengalami penambahan jenis penggunaan lahan yaitu tambak dan ladang. Penggunaan lahan terbesar di Kecamatan Watang Sawitto adalah areal Persawahan yaitu sebesar 79.32% dari luas wilayah. Areal Kebun Campur menempati urutan kedua dengan total 10.52% dari luas wilayah Kecamatan Watang Sawitto. Sedangkan Permukiman menempati urutan ketiga dengan luas 10.01 dari total luas wilayah.



Gambar 6. Citra Udara Kecamatan Watang Sawitto tahun 2009
Sumber: Citra Udara tahun 2009



Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto tahun 2009
Sumber: *Geografic Information System* dan Peta Citra Udara tahun 2009

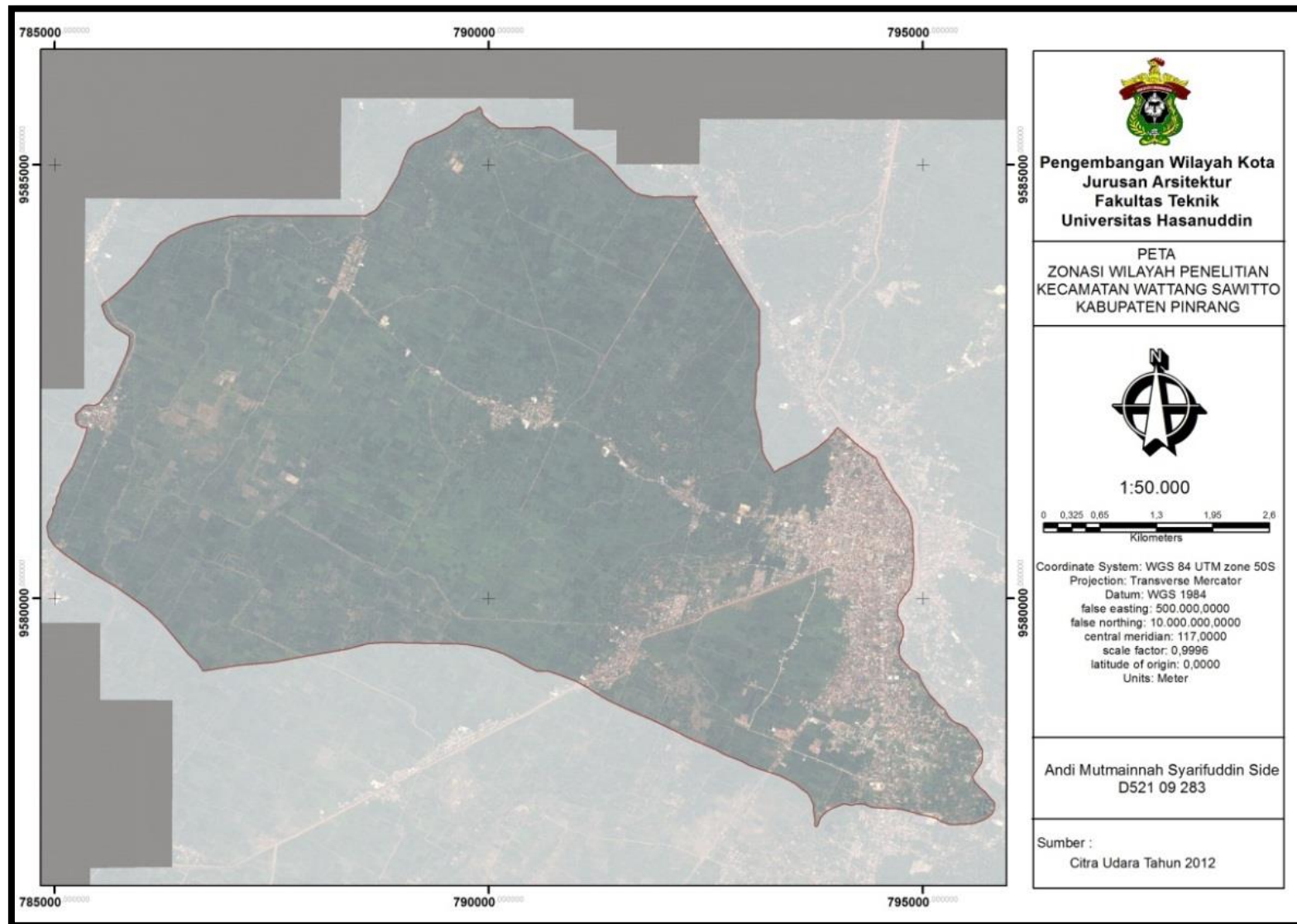
3. Penggunaan Lahan Tahun 2012

Gambar 9 menunjukkan peta penggunaan lahan yang telah dibuat dengan mengacu pada Citra Udara serta survey lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 13.

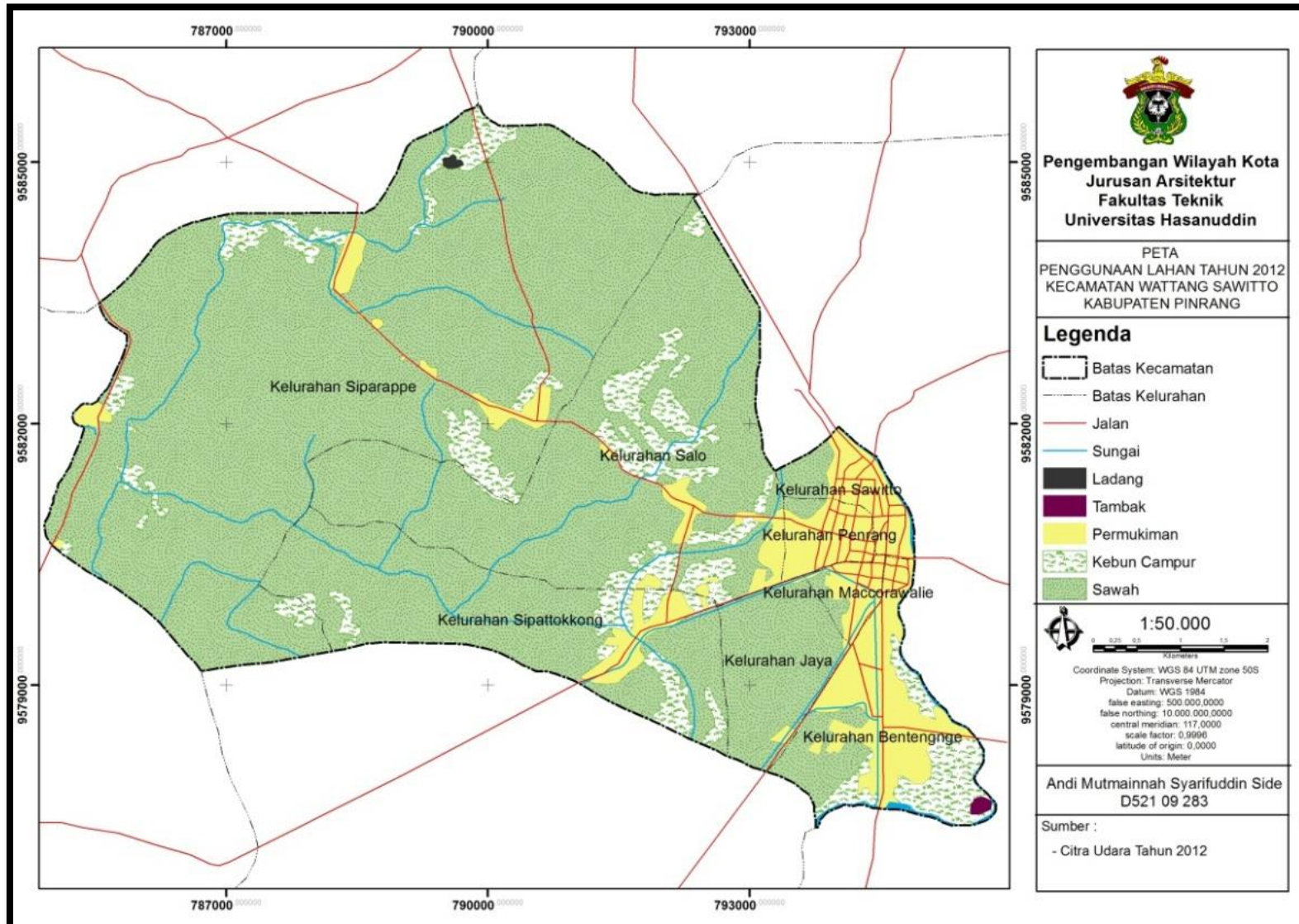
Tabel 13. Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2012

Jenis Lahan	Luas (Km²)	Persentase (%)
Pemukiman	6.14	10.41
Kebun campur	6.22	10.55
Persawahan	46.51	78.88
Tambak	0.05	0.08
Ladang	0.04	0.07
Jumlah	58.96	100.00

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa jenis penggunaan lahan terbesar di Kecamatan Watang Sawitto adalah areal Persawahan yaitu sebesar 78.88% dari luas wilayah. Areal Kebun Campur menempati urutan kedua dengan total 10.55% dari luas wilayah Kecamatan Watang Sawitto. Sedangkan Permukiman menempati urutan ketiga dengan luas 10.41% dari total luas wilayah.



Gambar 8. Citra Udara Kecamatan Watang Sawitto tahun 2012
 Sumber: Citra Udara tahun 2012



Gambar 9. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Wattang Sawitto tahun 2012
Sumber: *Geographic Information System* dan Peta Citra Udara tahun 2012

Berikut kondisi eksisting penggunaan lahan di Kecamatan Watang Sawitto. Dimana Kecamatan Watang Sawitto merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Pinrang yang merupakan ibu kota kabupaten yang letaknya berada di pusat kota. Kecamatan watang sawitto terdiri dari delapan kelurahan diantaranya kelurahan Siparappe, kelurahan Salo, kelurahan Sipatokkong, kelurahan Penrang, Kelurahan Jaya, kelurahan Sawitto, kelurahan Maccorawalie, dan kelurahan Bentengnge. Dimana kelurahan Maccorawalie, kelurahan Sawitto dan Kelurahan Jaya berada di pusat kota. Kecamatan Watang Sawitto dulunya tidak begitu ramai namun, seiring perkembangan zaman yang terus maju dan berkembang ditambah dengan jumlah penduduk yang tiap tahun terus bertambah maka menuntut kebutuhan akan lahan. Dimana kita ketahui lahan di kecamatan Watang Sawitto didominasi oleh lahan sawah dan kebun. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit lahan sawah dan kebun di kecamatan Watang Sawitto terus berkurang. Tentunya hal demikian menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Diantaranya dari tanah sawah dan kebun ada yang berubah fungsi menjadi permukiman, perkantoran, perdagangan dan lain-lain. Berikut hasil survey lapangan kondisi eksisting kecamatan Watang Sawitto saat ini:



Gambar 13. Kantor Bupati Pinrang
Sumber: Hasil Survey 2013

Gambar 13 diatas adalah salah satu kantor pemerintahan Kabupaten Pinrang yang terletak di Kecamatan Watang Sawitto. Dimana lahan yang

digunakan dulunya adalah tanah persawahan yang kini beralih fungsi menjadi sebuah pusat pemerintahan. Kantor Bupati Pinrang adalah salah satu pusat perkantoran yang terdapat di Kecamatan Watang Sawitto.



Gambar 14. Citra Jamariah Residence
Sumber: Hasil Survey 2013

Gambar 14 adalah salah satu perumahan baru yang terbangun di Kecamatan Watang Sawitto. Yang juga merupakan salah satu proses alih fungsi lahan persawahan menjadi sebuah pemukiman.



Gambar 15. Pusat Perbelanjaan
Sumber: Hasil Survey 2013

Gambar 15 diatas merupakan pusat perbelanjaan yang terdapat di Kecamatan Watang Sawitto, yang baru-baru saja selesai dibangun. Dan dimana pusat perbelanjaan tersebut berada di pusat kota pinrang.



Gambar 16. SPBU Maccorawalie
Sumber: Hasil Survey 2013

Gambar 16 merupakan salah satu SPBU yang terdapat di Kecamatan Watang Sawitto. Yang terletak di kelurahan Maccorawalie yang juga merupakan pusat kota. Dimana SPBU berdiri diatas tanah persawahan yang disekitarnya terdapat beberapa rumah penduduk dan pusat perkantoran yang ada di kabupaten Pinrang.



Gambar 17.SMA Unggulan
Sumber: Hasil Survey 2013

Gambar 17 diatas merupakan salah satu SMA yang ada di kabupaten Pinrang, yang terletak di kecamatan Watang Sawitto kelurahan Maccorawalie. Dimana SMA unggulan tersebut dulunya adalah sebuah pusat perkantoran yang ada di kelurahan maccorawalie kini berubah menjadi sebuah pusat pendidikan.



Gambar 18.Sawah
Sumber: Hasil Survey 2013

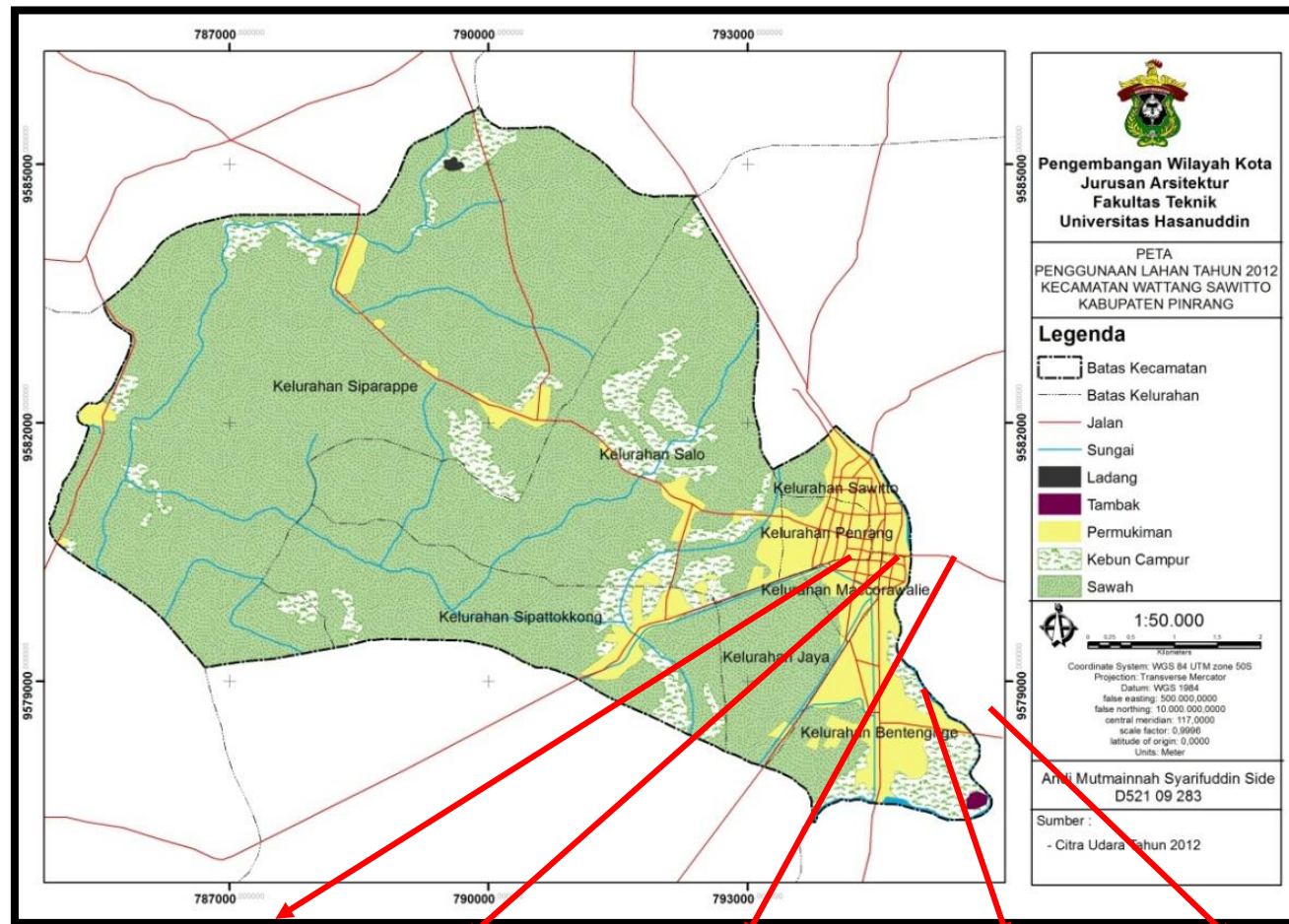
Gambar 18 diatas merupakan sebuah persawahan yang ada di kecamatan Watang Sawitto.Dimana dapat kita lihat pada gambar diatas, disekitar persawahan terdapat perumahan yang baru dibangun.Merupakan salah satu alih fungsi lahan yang terjadi di kecamatan Watang Sawitto.



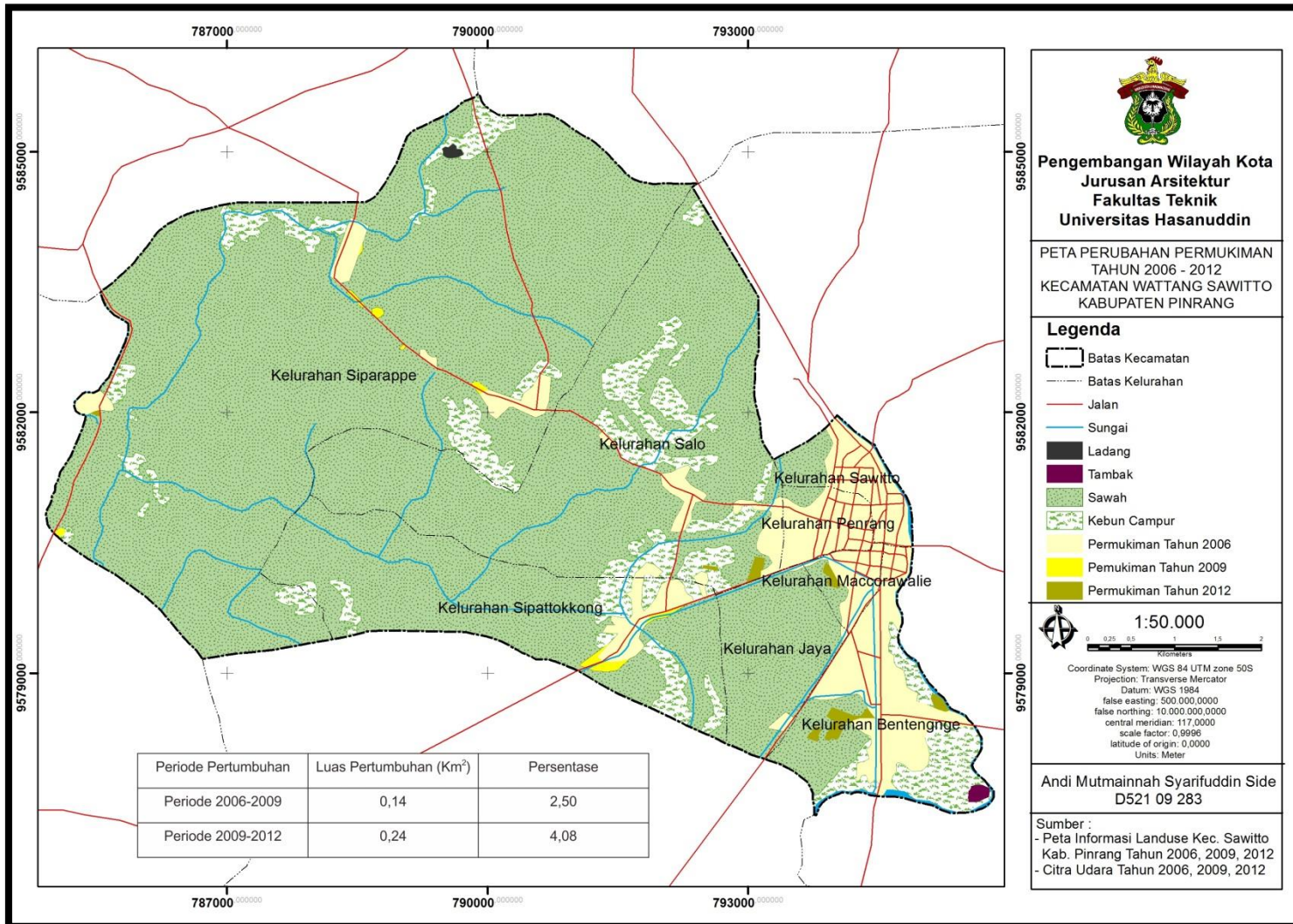
Gambar 19.TPA
Sumber: Hasil Survey 2013

Gambar 19 diatas merupakan TPA yang ada di kecamatan Watang Sawitto.dimana tempat pembuangan akhir sampah masyarakat adalah sebuah kebun yang terdapat di kelurahan Bentengnge.Sampah diatas merupakan sampah rumah tangga dari tiap rumah tangga yang terdapat di kelurahan Benteng'e. Hal tersebut dapat berdampak pada masalah lingkungan yang tentunya akan menimbulkan penyakit.

Gambar 20 dibawah adalah kondisi eksisting penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Alih fungsi lahan yang terjadi yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Dimana terdiri dari SPBU, Pusat Pendidikan, Perumahan, Pusat Perkantoran Serta Pusat Perbelanjaan.



Gambar 20 Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto
Sumber: *Geografic Information System* dan Peta Citra Udara tahun 2012



**Pengembangan Wilayah Kota
Jurusan Arsitektur
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin**

PETA PERUBAHAN PERMUKIMAN
TAHUN 2006 - 2012
KECAMATAN WATTANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG

Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Sungai
- Ladang
- Tambak
- Sawah
- Kebun Campur
- Permukiman Tahun 2006
- Permukiman Tahun 2009
- Permukiman Tahun 2012

1:50.000

Coordinate System: WGS 84 UTM zone 50S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000.0000
false northing: 10.000.000.0000
central meridian: 117.0000
scale factor: 0.9996
latitude of origin: 0.0000
Units: Meter

Andi Mutmainnah Syarifuddin Side
D521 09 283

Sumber :
- Peta Informasi Landuse Kec. Sawitto
Kab. Pinrang Tahun 2006, 2009, 2012
- Citra Udara Tahun 2006, 2009, 2012

Gambar 21. Peta Perubahan Lahan Permukiman di Kecamatan Watang Sawitto
Sumber: *Geografic Information System* dan Peta Citra Udara tahun 2009, 2006 dan 2012

D. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto

1. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman

Gambar 10 diatas merupakan peta perubahan penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Watang Sawitto dimana perubahan penggunaan lahan permukiman dari tahun 2006-2009 sebesar 2.50%.Kemudian perubahan penggunaan lahan permukiman dari tahun 2009-2012 sebesar 4.08%.

Tabel 14. Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman Kecamatan Watang Sawitto

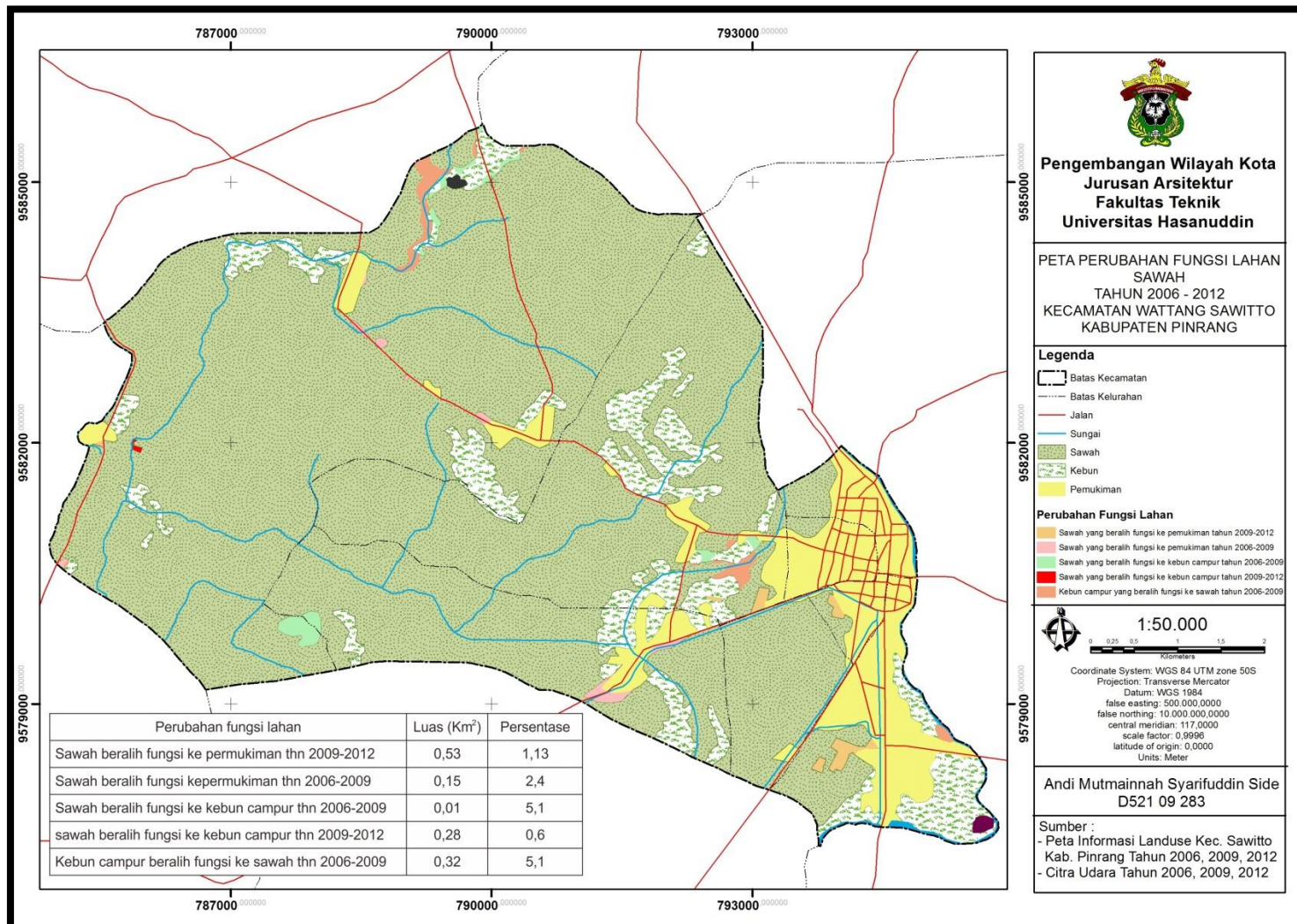
Priode Pertumbuhan	Luas Pertumbuhan (Km ²)	Persentase (%)
Priode 2006-2009	0.14	2.50
Priode 2009-2012	0.24	4.08

2. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Persawahan

Gambar 11 dibawah menunjukkan peta perubahan penggunaan lahan persawahan di Kecamatan Watang Sawitto dimana perubahan penggunaan lahan persawahan ke permukiman dari tahun 2006-2009 sebesar 2.4 %.Kemudian perubahan penggunaan lahan persawahan dari tahun 2009-2012 sebesar 1.13%.

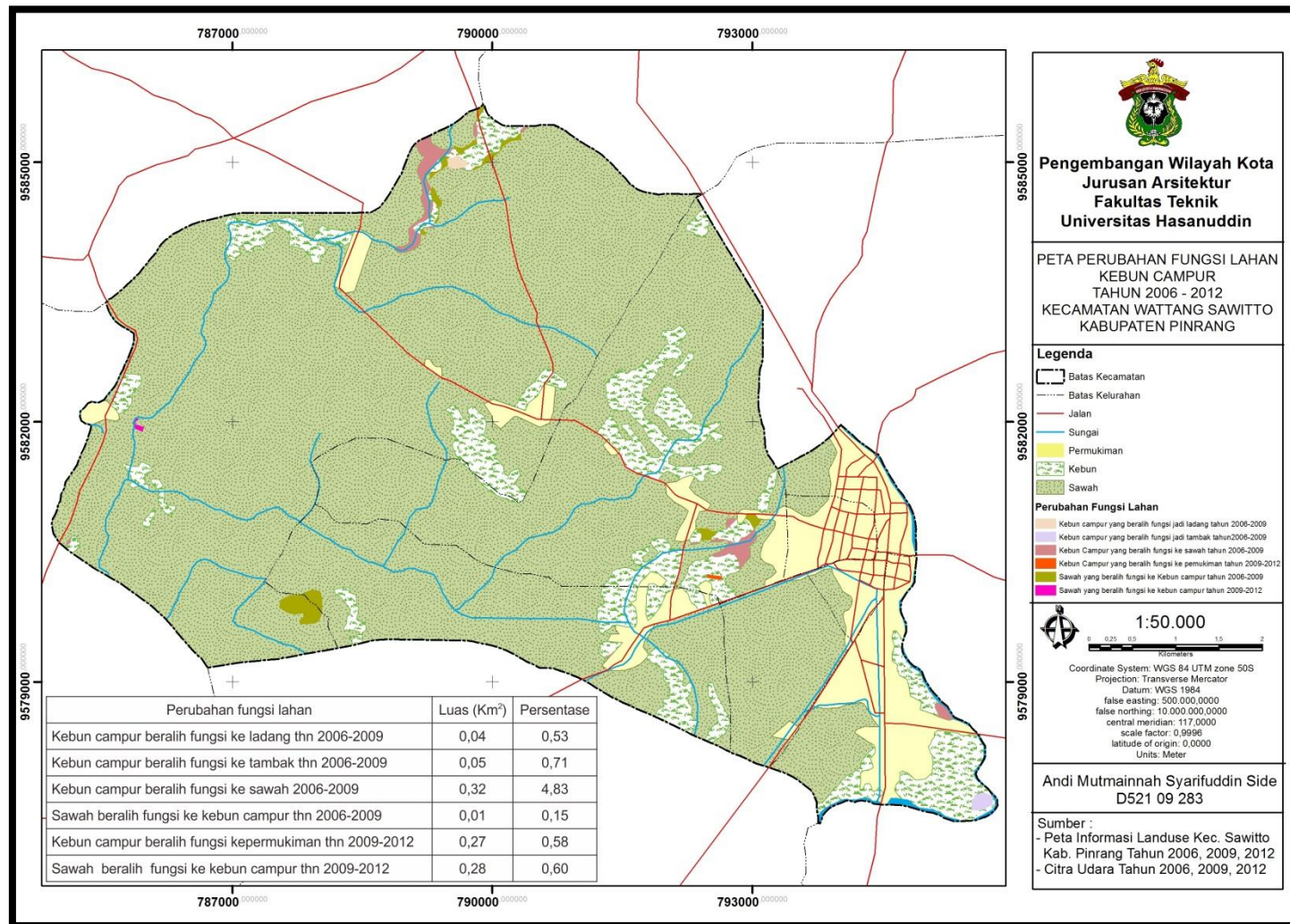
Tabel 15. Perubahan Penggunaan Lahan Persawahan Kecamatan Watang Sawitto

Perubahan Fungsi Lahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Sawah beralih fungsi ke permukiman 2006-2009	0.15	2.4
Sawah beralih fungsi ke permukiman 2009-2012	0.53	1.13
Sawah beralih fungsi ke kebun campur 2006-2009	0.01	5.1
Sawah beralih fungsi ke kebun campur 2009-2012	0.28	0.6
Kebun campur beralih fungsi ke sawah 2006-2009	0.32	5.1



Gambar 22. Perubahan Lahan Persawahan

Sumber: *Geografic Information System* dan Peta Citra Udara tahun 2006, 2009 dan 2012



Gambar 23. Perubahan Lahan Kebun Campur
Sumber: Geografic Information System dan Peta Citra Udara Tahun 2006, 2009, dan 2012

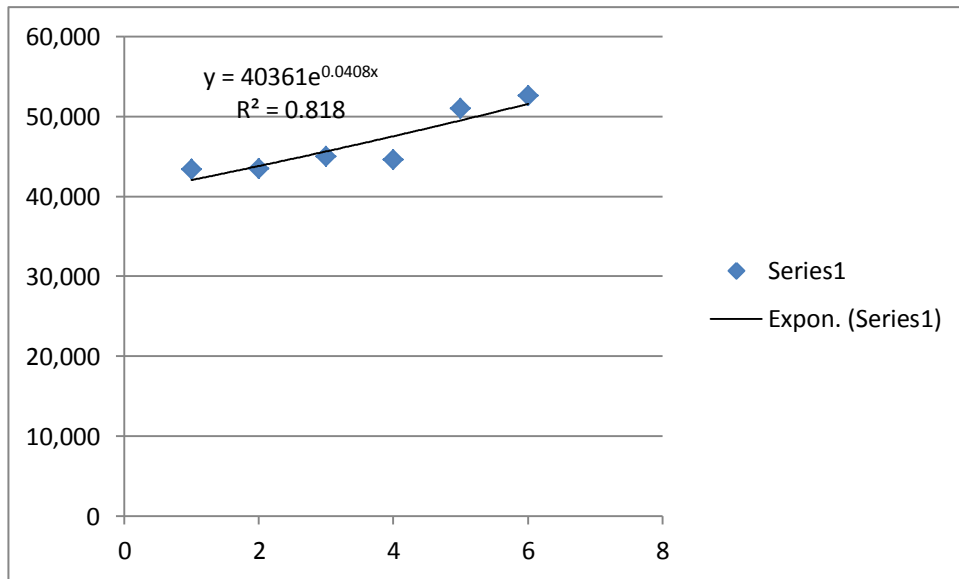
3. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kebun Campur

Gambar 12 diatas menunjukkan peta perubahan penggunaan lahan kebun campur di Kecamatan Watang Sawitto dimana perubahan penggunaan lahan kebun campur ke permukiman 0.58%.

Tabel 16. Perubahan Penggunaan Lahan Kebun Campur Kecamatan Watang Sawitto

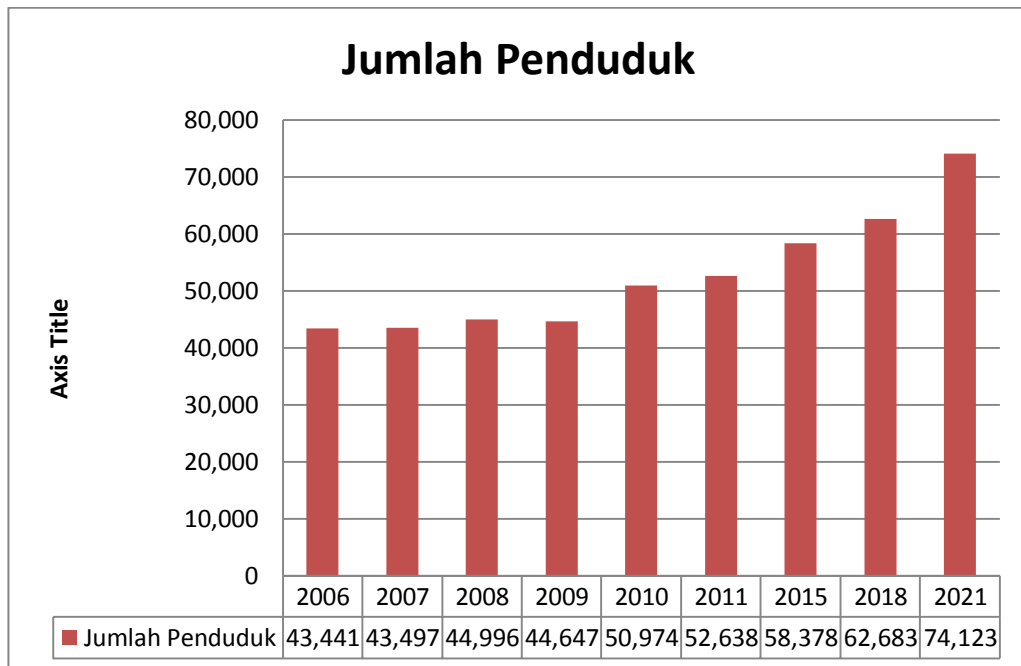
Perubahan Fungsi Lahan	Luas (Km²)	Persentase (%)
Kebun Campur beralih fungsi ke ladang 2006-2009	0.04	0.53
Kebun Campur beralih fungsi ke tambak 2006-2009	0.05	0.71
Kebun Campur beralih fungsi kesawah 2006-2009	0.32	4.83
Sawah beralih fungsi ke kebun campur 2006-2009	0.01	0.15
Kebun Campur beralih fungsi ke Permukiman 2009-2012	0.27	0.58
Sawah beralih fungsi ke kebun campur 2009-2012	0.28	0.60

E. Proyeksi Jumlah Penduduk



Grafik 1. Polynominal
Sumber: Excel 2010

Grafik 1 diatas adalah rumus yang digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dapat dilihat pada grafik 2 dibawah.



Grafik 2. Proyeksi Jumlah Penduduk
Sumber: Analisis Peneliti

Grafik 2 diatas menunjukkan proyeksi penduduk pada tahun 2015 sebesar 58.378 jiwa, kemudian pada tahun 2018 sebesar 62.683 jiwa dan pada tahun 2021 74.123 jiwa.

F. Perubahan Pola Penguasaan Lahan

Perubahan pola penguasaan lahan Kecamatan Watang Sawitto dapat diamati dari suatu bentuk pengaturan lahan oleh pemilik, penguasaan dan pengusahaan atas lahan. Konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Watang Sawitto merupakan salah satu contoh kurang bijaksananya pemerintah terhadap penanggulangan kepadatan penduduk di perkotaan yang mengakibatkan timbulnya *squatter area*.

Sebelum terjadi alih fungsi lahan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang berperan sebagai pemilik dan penguasa lahan, sedangkan pihak Developer berperan sebagai pengusaha lahan. Dapat dikatakan bahwa sebelumnya sistem penguasaan lahan di Kecamatan Watang Sawitto tergolong ke dalam tipe Sosialisme, dimana sumber agraria (lahan) dikuasai oleh negara. Namun, setelah terciptanya permukiman di atas lahan (terkonversi), peran penguasa lahan berpindah tangan menjadi milik penduduk yang menempati lahan. Perubahan penguasaan lahan ke tangan penduduk menyebabkan perubahan pola penguasaan lahan di Kecamatan Watang Sawitto menjadi tipe Populisme, yaitu sumber agraria (lahan) dikuasai oleh masyarakat. Dikatakan penguasa lahan karena penduduk di Kecamatan Watang Sawitto dapat menguasai lahan secara efektif salah satunya, yaitu penduduk dapat menempati lahan secara leluasa, leluasa di penelitian ini dimaksudkan bahwa penduduk dapat tinggal dan menetap di daerah Kecamatan Watang Sawitto tanpa seizin Pemerintah.

G. Perubahan Orientasi Nilai Atas Lahan

Dampak yang timbul terkait perubahan orientasi nilai dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk perubahan, yaitu perubahan dari segi nilai sosial dan nilai ekonomis lahan. Terkonversinya lahan menjadi permukiman di Kecamatan Watang Sawitto menimbulkan perubahan fungsi. Perubahan fungsi ini berdampak terhadap perubahan nilai sosial lahan di masyarakat.

Nilai sosial lahan dalam penelitian ini dimaknai sebagai pandangan dan pemaknaan masyarakat terhadap lahan. Lahan di Kecamatan Watang Sawitto di maknai oleh warga di Kecamatan Watang Sawitto dan sekitarnya sebagai daerah yang berfungsi sebagai lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lanto (60 tahun), penduduk Lalle Lama yang sudah tinggal di wilayah Kelurahan Maccorawalie sejak lahir, mengatakan bahwa Sawah dan kebun disekitarnya memang berfungsi sebagai tempat pertanian yang merupakan sumber penghidupan satu-satunya.

Pemaknaan daerah Kecamatan Watang Sawitto dan sekitarnya sebagai daerah pertanian menimbulkan ketergantungan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Watang Sawitto sangat tinggi. Dengan timbulnya pemukiman, nilai sosial yang dianut oleh masyarakat berubah, lahan sebagai fungsi sosial yaitu daerah pertanian berubah fungsi menjadi pemukiman.

Lahan yang berfungsi sebagai daerah pertanian kini berubah menjadi komersil, dimana di dalamnya terdapat aktivitas penduduk Kecamatan Watang Sawitto yang membeli, menyewa dan membangun tempat tinggal diatas lahan.

Nilai ekonomis terhadap lahan menjadi meningkat, sedangkan nilai sosial terhadap lahan menurun, sehingga nilai ekonomis melemahkan nilai sosial yang ada di dalam masyarakat.

H. Perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian pada priode 2006, 2009 hingga 2012.

Tabel 17. Perubahan Luas Lahan Pertanian menjadi nonpertanian

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun	Luas (Km ²)
Sawah ke Permukiman	2006-2009	0.15
	2009-2012	0.53
Kebun Campur ke Permukiman	2009-2012	0.27
Total		0.95

Tabel 17 diatas menunjukkan perubahan luas lahan pertanian menjadi non pertanian.luas perubahan lahan pertanian sebesar 0.95 Km², hal ini di sebabkan akibat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya bertambah.

I. Permintaan Lahan 10 Tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto

Tabel 18.Permintaan Lahan 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto

Tahun	Jumlah Penduduk	Eksisting Permukiman (Km ²)	Permintaan Lahan (standar 26m ² /jiwa)
2006	43.441	5.76	1,129
2009	44.647	5.9	1,160
2012	52.638	6.14	1,368
2015	58.378	-	1,517
2018	62.683	-	1,629
2021	74.123	-	1,927

Tabel 18didas menunjukkan permintaan lahan 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto dimana permintaan lahan pada tahun 2015 sebesar 1,517 m², kemudian pada tahun 2018 sebesar 1,629 m² dan pada tahun 2021 permintaan lahan sebesar 1,927m².

J. Dampak Alih Fungsi Lahan

1. Dampak Lingkungan

Dampak konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Watang Sawitto terhadap ekologi atau lingkungan dirasakan langsung oleh penduduk yang tinggal di Kecamatan Watang Sawitto dan sekitarnya.Dampak ekologi yang dialami oleh penduduk Kecamatan Watang Sawitto sangat terkait dengan pencemaran dan sanitasi lingkungan.Dengan lahan yang yang

terus mengalami perubahan dan jumlah penduduk yang tiap tahun bertambah, juga sikap masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan lingkungan terutama dalam hal pembuangan sampah, memungkinkan Kecamatan Watang Sawitto menjadi kota sampah.



Gambar 24. Kondisi Eksisting Lingkungan Sekitar Kecamatan Watang Sawitto

Sumber: Hasil Survey 2013

Sesuai dengan fungsi utama dari lahan Kecamatan Watang Sawitto, yaitu sebagai daerah ibukota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) maka timbulnya pemukiman di atas lahan tersebut menyebabkan tidak berfungsi kembali lahan sebagai semestinya. Dampak ekologi yang paling dirasakan adalah kekhawatiran tergenangnya air di pinggir jalan dan perumahan setiap tahunnya.

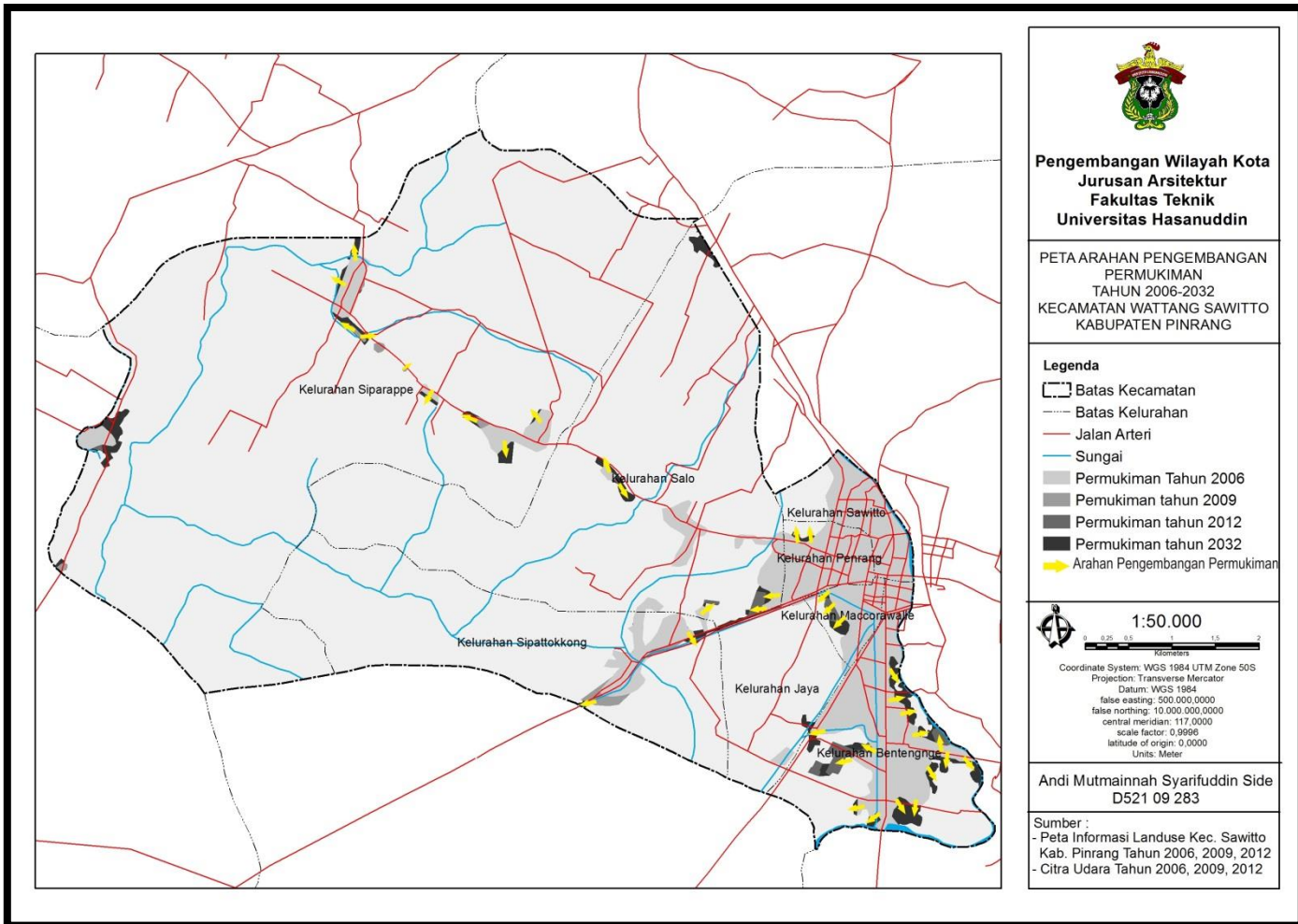
2. Dampak dari segi perubahan nilai sosial menjadi nilai ekonomi

Nilai sosial lahan dalam penelitian ini dimaknai sebagai pandangan dan pemaknaan masyarakat terhadap lahan. Lahan di Kecamatan Watang Sawitto di maknai oleh warga merupakan daerah yang berfungsi sebagai lahan pertanian. Pemaknaan Kecamatan Watang Sawitto sebagai daerah pertanian menimbulkan ketergantungan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Watang Sawitto sangat tinggi. Dengan timbulnya permukiman, nilai sosial yang dianut oleh masyarakat berubah, lahan sebagai fungsi sosial yaitu daerah pertanian berubah fungsi menjadi permukiman. Lahan yang berfungsi sebagai daerah pertanian kini berubah menjadi komersil., dimana di dalamnya terdapat aktifitas penduduk Kecamatan Watang Sawitto yang membeli, menyewa dan membangun tempat tinggal di atas

lahan. Nilai ekonomis terhadap lahan menjadi meningkat, sedangkan nilai sosial terhadap lahan menurun. Dengan demikian nilai ekonomis melemahkan nilai sosial yang ada di dalam masyarakat.

K. Arahana Pengembangan Permukiman

Gambar 25 dibawah menunjukkan arahan perubahan alih fungsi lahan Permukiman dua puluh tahun yang akan datang dimana arahan pengembangan permukiman di Kecamatan Watang Sawitto akan berkembang disekitar permukiman yang sudah terbangun. Berikut peta Arahan Perubahan Alih Fungsi Lahan Permukiman tahun 2032.



Gambar 25. Peta Arah Perubahan Alih Fungsi Lahan Permukiman tahun 2032

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah :

1. Perubahan luas lahan di Kelurahan Watang Sawitto sebesar 0.95 Km² yakni lahan pertanian menjadi non pertanian (permukiman), hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ketahun.
2. Permintaan lahan 10 tahun kedepan di Kecamatan Watang Sawitto dimana permintaan lahan pada tahun 2015 sebesar 1,517 m², kemudian pada tahun 2018 sebesar 1,629m² dan pada tahun 2021 permintaan lahan sebesar 1,927m².

B. Saran

1. Kepada Mahasiswa Untuk mahasiswa pengembangan Wilayah dan Kota agar melakukan penelitian lanjutan yang lebih baik demi kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Untuk Stakeholder kepada stakeholder yang bertanggung jawab dalam mengatur pembangunan di Kecamatan WatangSawitto agar selalu memperhatikan regulasi-regulasi hubungan dengan pemanfaatan lahan di Kabupaten Pinrang agar tidak terjadi konversi non build up area menjadi build up area yang berlebihan dan melanggar aturan yang telah dibuat sebelumnya.